



BULETIN

PARLEMENTARIA

NOMOR: 890/I/XII/2015

PANSUS PELINDO II DESAK RJ LINO DIBERHENTIKAN SEMENTARA



PANSUS RUU MINOL
DIHARAPKAN UNDANG
KALANGAN GURU



GURU MENJADI UJUNG
TOMBAK MUTU DAN
KUALITAS PENDIDIKAN

Jangan lewatkan
info DPR terkini
dan live streaming
TV Parlemen di
www.dpr.go.id



PANSUS PELINDO II DESAK RJ LINO DIBERHENTIKAN SEMENTARA



Pansus Pelindo II menerima masukan dari karyawan JICT

Tim Pansus Hak Angket Pelindo II mengunjungi Pelabuhan Tanjung Priok untuk bertemu dengan Direktur Utama Pelindo II RJ. Lino, Direksi JICT, sekaligus melihat dari dekat operasional pelabuhan. Pansus ingin mendapatkan data lengkap soal kinerja keuangan, operasional pelabuhan, dan kasus ketenagakerjaan di *Jakarta International Container Terminal (JICT)*.

Kunjungan diawali ke JICT, anak perusahaan Pelindo II. Gegap gempita para karyawan JICT menyambut kedatangan delegasi Pansus yang dipimpin langsung oleh Ketua Pansus Pelindo II Rieke Diah Pitaloka (F-PDI Perjuangan). SP JICT langsung mengajak delegasi Pansus beraudensi dengan para karyawan yang sebagian besar menjadi korban PHK direksi JICT.

Sedianya kedatangan Pansus pada Kamis (26/11/15) itu, ingin meminta data lengkap soal operasional JICT, tapi tak satu pun direksi yang menyambut. Bahkan, pegawai asing *Hutchinson Port Holding (HPH)* pemegang konsesi atas JICT pun tak ada yang menemui.

“Sebetulnya, kami berharap bisa bertemu dengan direksi untuk cek lapangan dan menagih dokumen yang mereka janjikan akan diberikan. Namun, mereka tidak ada,” ujar Rieke dalam pertemuan tersebut. Pansus Pelindo II akan mengungkap semua penyelewengan yang terjadi di JICT, termasuk berusaha menyelesaikan masalah PHK dan pekerja *outsourcing*.

Para karyawan JICT merasa terhibur dan menaruh harapan besar kepada delegasi Pansus yang datang, agar masalah intimidasi, teror, dan PHK yang menimpa para karyawan bisa segera diselesaikan. “Doakan kami tetap amanah bekerja,” seru Rieke lagi yang disambut pekik semangat dan tepuk tangan bergemuruh di ruang pertemuan.

Kunjungan diakhiri pertemuan dengan Dirut Pelindo II RJ. Lino. Dalam pertemuan tersebut Lino memaparkan keberhasilan yang dicapainya sejak ia bergabung dengan Pelindo II tahun 2009 di hadapan delegasi Pansus. Tak hanya capaian positif di Pelabuhan Tanjung Priok, Lino juga memaparkan

capaian keberhasilan di pelabuhan lain di Indonesia yang dikelola Pelindo II.

Rieke kembali mengingatkan Dirut Pelindo II agar datang bila Pansus mengundang rapat. Semua pihak juga mengingatkan Rieke agar kooperatif dengan Pansus untuk memberikan data yang sebenarnya. Pansus, kata Rieke, akan meminta bantuan Polri untuk menjemput paksa para pihak yang tak mau datang setelah dipanggil tiga kali oleh Pansus.

Sementara itu, Anggota Pansus Pelindo II Nurdin Tampubolon (F-Hanura) mendesak agar Dirut Pelindo II RJ. Lino segera diberhentikan sementara. Ini penting, supaya tak terjadi penyalahgunaan wewenang di tengah penyidikan yang dilakukan Pansus Pelindo II. Menurut Nurdin, bila Lino diberhentikan Pansus bisa bekerja dengan tenang. Tidak ada lagi intervensi dari para Direksi Pelindo II.

“Hal ini sesuai dengan permintaan para karyawan Pelindo II dan JICT yang merasa terancam, tertekan, bahkan dipecat, sehingga tidak merasa nyaman.

BULETIN PARLEMENTARIA

PENGAWAS UMUM: Pimpinan DPR-RI

PENANGGUNG JAWAB/KETUA PENGARAH: Dr.

Winantuningtyastiti, M. Si (Sekretaris Jenderal DPR-RI)

WAKIL KETUA PENGARAH: Dra. Damayanti, MSi (Deputi Persidangan dan KSAP)

PIMPINAN PELAKSANA: Drs. Djaka Dwi Winarko, M. Si. (Karo Humas dan Pemberitaan)

PIMPINAN REDAKSI: Irfan, S.Sos, MMSI (Kabag Pemberitaan)

WK. PIMPINAN REDAKSI: Dra. Tri Hastuti (Kasubag Penerbitan), Mediantoro SE (Kasubag Pemberitaan)

REDAKTUR: M. Ibnur Khalid; Iwan Armanias; Mastur Prantono

SEKRETARIS REDAKSI: Suciati, S.Sos; Ketut Sumerta, S. IP

ANGGOTA REDAKSI: Nita Juwita, S.Sos; Supriyanto;

Agung Sulistiono, SH; Rahayu Setiowati; Muhammad Husen; Sofyan Efendi

REDAKTUR FOTO: Eka Hindra

FOTOGRAFER: Rizka Arinindya; Naefuroji; M. Andri

Nurdriansyah; Yaserto Denus Saptoadji; Andi Muhamad; Jaka Nugraha

SIRKULASI: Abdul Kodir, SH, Bagus Mujiharjanto

ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA:

BAGIAN PEMBERITAAN DPR-RI, Lt.III Gedung Nusantara II DPR RI, Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta Telp. (021) 5715348, 5715586, 5715350 Fax. (021) 5715341, e-mail: dpr.pemberitaan@gmail.com; www.dpr.go.id/berita

Mereka mengusulkan supaya RJ Lino bisa diberhentikan sementara. Kalau ternyata Lino (dinyatakan) tidak ada masalah, maka kita akan bersihkan namanya dan bisa bekerja kembali,” ungkap Nurdin.

Nurdin menambahkan, dirinya tidak menemui sama sekali para pekerja asing saat sidak ke JICT. “Saya sama sekali tidak melihat orang asing bekerja di JICT. Padahal, perusahaan asing asal Hongkong, HPH, memiliki saham sebesar 51 persen, Pelindo II 49 persen. Jadi, sebenarnya tidak perlu dikelola oleh asing,” ungkap Nurdin.

Temuan lainnya, kata Nurdin, sesuai dengan laporan yang disampaikan SP JICT, Pelabuhan Koja juga sahamnya dikuasai HPH. Padahal, tadinya dimiliki oleh Pelindo II dan swasta nasional. Yang menjadi janggal adalah kontrak baru akan berakhir tahun 2018. “Saya mendapat info sudah diperpanjang lagi masa kontraknya, padahal belum habis, Ini harus dicari kebenarannya,” seru anggota Komisi XI DPR ini.

Politisi dari Dapil Sumatera Utara tersebut juga menambahkan, hasil dari temuan-temuan saat sidak ini, akan dirapatkan di Pansus Pelindo berikutnya. Kasus yang ada di Pelindo II, ternyata tidak hanya *mobile crane*. Banyak kasus yang perlu diungkap satu per satu.

Sebelum berkunjung ke JICT, Delegasi Pansus Pelindo II menemui Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. Fahri menyatakan, hak DPR untuk mengajukan pemberhentian Dirut Pelindo II. Dan Pimpinan DPR akan menjaga hak konstitusional DPR itu untuk menyelidiki suatu kasus hingga terungkap secara jelas dan tuntas. Menurut Fahri, proses penyelidikan yang dilakukan DPR kerap kali mendapat tantangan besar. Dan Pimpinan DPR akan ikut membantu mengawal kerja Pansus ini.



Ketua Pansus Pelindo II Rieke Diah Pitaloka menyerahkan dokumen kepada Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah

Mengenai beberapa pihak yang tak mau datang memberi keterangan di hadapan Pansus, Fahri mengatakan, DPR sudah menjalin kerja sama dengan Polri untuk mengambil tindakan hukum. Bila ada pihak yang tiga kali dipanggil tak hadir, maka DPR bisa meminta bantuan Polri untuk menjemput paksa dan menghadirkannya ke rapat Pansus DPR.

Hadir dalam pertemuan tersebut, selain Direksi Pelindo II, juga Dewan Komisaris Pelindo II dan Direksi JICT. Sementara Anggota Pansus yang hadir dalam pertemuan tersebut adalah Masinton Pasaribu (F-PDI Perjuangan), Syukur Nababan (F-PDI Perjuangan), I Putu Sudiartana (F-PD), Mohamad Hekal (F-Gerindra), dan Mukhlisin (F-PPP). (MH) FOTO: JAKA/PARLE/OD

GURU MENJADI UJUNG TOMBAK MUTU DAN KUALITAS PENDIDIKAN



Ketua DPR RI Setya Novanto

Kualitas kehidupan bangsa sangat ditentukan oleh mutu pendidikan. Pendidikanlah yang mengangkat harkat dan martabat, serta menyejajarkan Indonesia dengan bangsa-bangsa lain. Pendidikanlah yang membuka mata seseorang satu sama lain tentang dunia yang sedang dihadapi.

Melalui Hari Guru yang diperingati pada 25 November setiap tahunnya, Ketua DPR RI Setya Novanto hendak mengajak seluruh anak bangsa untuk merefleksikan peran Guru sebagai salah satu Agen Perubahan (Agent of Change). Mengingat, tidak ada kemajuan tanpa diawali gerakan perubahan. Dan gerakan perubahan tidak lepas dari keterlibatan guru dalam segala aspek.

“Karena itu, saya menyadari sepenuhnya, peningkatan pendidikan tidak akan pernah melupakan keterlibatan dan peran penting para guru. Merekalah ujung tombak mutu dan kualitas kehidupan bangsa. Turut menentukan wajah Indonesia di hadapan negara-negara lain,” kata Novanto, dalam rilisnya yang diterima Parlemen, Rabu (25/11/15).

Tidak kalah penting, tambah Novanto, guru juga mewariskan teladan tentang bagaimana menjalani kehidupan yang baik. Teladan tentang kehidupan yang berkhidmat pada warisan leluhur. Dan teladan yang tidak sekedar diperoleh dari bangku sekolah, pendidikan formal, namun dari setiap interaksi kehidupan keseharian.

“Teladan itulah yang pernah saya peroleh saat mengenyam pendidikan Sekolah Dasar 73 Tebet, Jakarta Selatan dan Sekolah Menengah Atas 9 Jakarta pada dua orang sosok guru dan pendidik, yakni Bapak Ruhiyat dan Bu Sukati,” kenang Novanto.

Politisi F-PG itu mengenang seorang Bapak Ruhiyat yang

tidak sekedar menempatkan dirinya sebagai sosok pengajar Bahasa Indonesia yang terkenal kalem dan penyabar. Selama dididik oleh beliau, Novanto melihat hampir tak pernah ada amarah dari raut wajahnya, meski dikelilingi puluhan siswa dengan tabiat dan perilaku yang cenderung menyebalkan dan menjengkelkan.

Namun, lanjut Novanto, lain halnya dengan Ibu Sukati. Meski ia adalah seorang wanita, luapan amarah dan emosinya senantiasa menghiasi keseharian siswa SMA 9 Jakarta kala itu. Boleh jadi sosok sebagai pengampu mata pelajaran Matematika Al-Jabar, juga turut mencirikan lazimnya guru Matematika yang terkenal “galak”.

“Namun, saya mengenang kedua sosok yang cenderung berlainan karakter tersebut memiliki ciri guru dan pendidik yang sesungguhnya. Mereka tidak sekedar mengajarkan apa yang tertera di atas kertas dan tercoret di papan tulis. Mereka mewariskan keteladanan, bahwa kesabaran dan amarah yang ditunjukkan pada saya mengandung nilai universal tentang bagaimana menghadapi hidup dengan sabar dan mendisiplinkan diri dengan baik,” tutur Novanto.

Politisi asal dapil NTT itu mengatakan, dari sosok seorang Bapak Ruhiyat, ia meneladani kesabaran dalam menghadapi

segala ujian kehidupan. Apalagi sebagai *public figur* yang senantiasa tidak pernah sepi dari fitnah, isu maupun gosip.

Sementara dari Ibu Sukati, ia memperoleh teladan tentang bagaimana mendisiplinkan diri dalam meraih impian dan tujuan hidup. Ibu Sukati berpesan, hidup yang cenderung keras membutuhkan ketegasan dan kedisiplinan, agar mampu ditaklukkan.

“Saya berharap, tipikal guru seperti itulah yang mampu berperan penting dalam peningkatan mutu kehidupan bangsa dan negara. Mutu yang tidak sekedar dinilai dari peningkatan material, tapi juga spiritual,” imbuh Novanto.

Untuk itu, ia juga berterima kasih atas segala sumbangsih yang diberikan oleh para guru. Yakni, para guru dalam arti yang luas, baik itu tenaga pengajar formal, informal, pendidik dan mereka yang menjalankan aktivitas pengajaran dan pendidikan demi membangun kualitas kehidupan anak bangsa.

“Begitu besar jasa kalian, hingga tak ternilai dengan apapun. Begitu besar pengorbanan kalian, hingga kita sulit menghitungnya. Itulah kalian, Pahlawan tanpa Tanda Jasa,” tutup Novanto. (SF), FOTO : JAKA NUGRAHA/PARLE/HR.

JEPANG SAMBUT BAIK KERJASAMA DENGAN INDONESIA



Pimpinan DPR berfoto bersama Delegasi Jepang

Kunjungan 1000 Delegasi Jepang ke Indonesia dianggap sebagai langkah baik hubungan kerjasama antara Indonesia dengan Jepang. Bisa dikatakan, ini salah satu kunjungan dengan jumlah delegasi yang sangat banyak.

Demikian dikatakan Ketua DPR Setya Novanto, usai menerima perwakilan 21 Delegasi Jepang, yang dipimpin oleh *Former Minister of Economy, Trade, and Industry, and Chairman of General*

Council of Liberal Party of Japan, Mr. Toshihiro Nikai, di Gedung Nusantara III, Selasa (24/11/15) petang.

“Banyak perbicangan yang luar biasa. Masalah yang berkaitan dengan kerjasama, yaitu parlemen dengan parlemen, dan bilateral kedua negara. Diantaranya mengenai pemuda dan perempuan, pekerja, pariwisata, ekonomi, hingga pertahanan. Banyak masukan, yang diharapkan kerjasama

kedua negara terus dapat berjalan dengan sebaik-baiknya,” kata Novanto.

Novanto memastikan, kunjungan Delegasi Jepang ini juga sebagai tindak lanjut kunjungan DPR ke Jepang, yang bertemu dengan Perdana Menteri dan Kaisar Jepang, beberapa waktu yang lalu.

“Beliau sangat senang sekali untuk kerjasama terus sampai ke depan. Kita apresiasi kepada parlemen dan pemerintah Jepang yang ingin terus kerjasama dengan Indonesia,” imbuh politisi F-PG itu.

Usai pertemuan, Novanto mengajak seluruh delegasi menuju Ruang Paripurna di Gedung Nusantara, dimana sebelumnya, 240-an delegasi Jepang juga sudah meninjau ruangan. Novanto menjelaskan tentang Ruang Paripurna kepada Nikai dan delegasi lainnya. Kemudian, rombongan menuju Gedung Nusantara IV, untuk dilanjutkan acara *standing reception*.

Dalam pidatonya, Novanto mengatakan, dalam kunjungannya ke Jepang minggu lalu, mitra DPR di LLDP dan Partai Demokratik dan Keidanren telah mengingatkan bahwa hubungan ekonomi berkembang, kemitraan strategis kedua negara juga akan berkembang baik.

Juga disampaikan bahwa peningkatan investasi Jepang untuk infrastruktur maritim dan konektivitasnya, serta untuk industri menengah berorientasi ekspor dan pariwisata, sangatlah dimungkinkan.

“Kami berharap dalam semangat persaudaraan yang tinggi, acara-acara kita berlangsung, sehingga manfaat yang besar bagi kedua negara dan bangsa dapat dihasilkan dari kunjungan anda semua ini,” harap politisi asal dapil NTT itu.

Novanto menegaskan, bahwa di Indonesia tersedia peluang untuk kerjasama yang besar di berbagai bidang, karena perekonomian kami tumbuh dinamis, terutama menjelang dimulainya inte-

grasi ekonomi ASEAN.

Sementara itu dalam konferensi persnya kepada awak media, Nikai mengatakan bahwa pertemuan dengan Pimpinan DPR ini merupakan suatu kehormatan bagi dirinya. Ia juga mengatakan, pihaknya telah mengusulkan Hari Tsunami Dunia ke PBB, dan dukungan dari 131 negara atas usulan tersebut.

“Indonesia pernah mengalami bencana tsunami, rencananya kami akan berkunjung ke Aceh untuk melihat pemulihan akibat bencana tersebut. Hasil pantauan akan kami bawa ke Jepang, untuk dipelajari dalam menghadapi bencana,” kata Nikai.

Menyinggung gagalnya investasi ke-

reta cepat oleh Jepang di Indonesia, Nikai mengatakan bahwa ia tidak mengetahui perinciannya. Itu cukup menjadi masalah internal Indonesia. Namun ia menegaskan, bahwa kereta Shinkansen merupakan kebanggaan masyarakat Jepang.

“Saya tidak akan mengisukan lagi permasalahan Shinkansen. Tapi lebih melihat masa depan terkait kerjasama kedua negara,” kata Nikai.

Masih dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi XI Indah Kurnia (F-PDI Perjuangan) yang turut hadir dalam acara berharap, kerjasama Indonesia dengan Jepang dapat terus ditingkatkan. (SF) FOTO : ANDRI/PARLE/

NEGARA HARUS INVESTASI BESAR UNTUK GURU

Hari Guru Nasional diperingati tanggal 25 November. Masalah kesejahteraan dan kualitas guru masih tetap isu krusial yang perlu mendapat perhatian. Wakil Ketua DPR Bidang Korkesra, Fahri Hamzah mengatakan, masih banyak guru yang belum hidup berkecukupan.

“Harusnya anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN itu juga fokus pada pembiayaan guru. Karena kalau guru kita tidak tenang, maka murid menjadi *blingsatan*. Tapi kalau gurunya tenang, mereka akan menjadi baik,” kata Fahri, di Gedung Nusantara II, Selasa (24/11/15) malam.

Politisi F-PKS itu mengingatkan, jika ingin menyelamatkan pendidikan dan peradaban Indonesia, maka negara harus investasi besar-besaran terhadap guru. Mengingat, guru tidak hanya memberikan pengetahuan, tapi memberikan cinta dan inspirasinya.

Kesejahteraan guru banyak yang belum tercapai.

“Di desa itu, guru-guru identik dengan penderitaan, dan kesulitan hidup. Masih banyak yang belum berkecukupan. Sehingga ini menjadi tugas kita untuk memuliakan guru. Kalau negara belum bisa, paling tidak kita secara pribadi dapat membantu guru yang memiliki jasa kepada kita,” pesan Fahri.

Politisi asal dapil NTB itu juga terinspirasi film *Laskar Pelangi*. Film yang memiliki *setting* di SD Muhammadiyah Gantong, di Belitong itu menurutnya, merupakan cerminan kondisi pendidikan di daerah. Ia mengaku terharu dengan film itu.

“Itu adalah potret guru di pedesaan. Guru-guru masih digaji dengan beras dan sekolah kekurangan guru. Namun, sang guru tetap *dedicated*, menuntun murid untuk punya kesempatan belajar yang baik, dan punya mimpi



Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah

untuk masa depan. Sehingga murid-muridnya sukses,” kata Fahri, sembari menceritakan pernah punya pengalaman dipukul oleh guru ketika bersekolah dulu.

Di akhir perbincangan, sampai saat ini Fahri mengaku masih sering berkomunikasi dengan guru-guru ketika ia masih bersekolah, termasuk guru-guru di dapilnya. Para guru itu sering berkunjung ke rumahnya, untuk bersilaturahmi. (SF), FOTO : DENUS/PARLE/HR.

KETUA DPR PERCAYAKAN KE MKD

Ketua DPR Setya Novanto, mempercayakan semua proses persidangan dirinya kepada Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Ia juga berharap, MKD dapat menjalankan fungsinya, dengan sebaik-baiknya. Hal ini semua demi kepentingan rakyat.

“Saya percayakan semua kepada MKD. Saya persilahkan untuk mengevaluasi. Saya betul-betul percayakan semuanya kepada MKD, dan dapat menjalankan dengan sebaik-baiknya. Saya akan hormati secara baik,” kata Novanto, usai menerima Delegasi Je-

pang, di Gedung Nusantara IV, Selasa (24/11/15) petang.

Termasuk transkrip rekaman yang beredar hanya 11 menit dari 120 menit pertemuan, Novanto pun mempercayakan proses pemeriksaan di MKD.

“Ya itu saya hanya mendengar saja masalah 11 menit yang sudah disampaikan, namun semua itu hanya saya percayakan kepada MKD untuk menindak lanjuti masalah ini, baik itu rekaman atau penyadapan,” imbuh politisi F-PG itu.

Ketika ditanya apakah akan melaporkan tindakan Menteri ESDM Sudirman Said kepada pihak berwajib, Novanto menyatakan tidak perlu.

“Saya rasa tidak perlu harus bertindak lebih jauh, karena itu kita percayakan kepada MKD untuk menjalankan ini,” tuturnya.

Novanto menambahkan, ia akan mengikuti perkembangan masalah dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral itu. Ia menilai, mungkin Sudirman lalai atau ada hal-hal yang tidak diketahui Novanto latar belakangnya.

“Saya sebagai manusia tentu apapun masalahnya, tentu saya persilahkan.

Yang jelas, mungkin Pak Sudirman ada hal-hal yang khilaf atau apapun setelah ini selesai, itu akan saya maafkan,” tutup politisi asal dapil NTT itu.

Dalam kesempatan yang berbeda, MKD memutuskan untuk melanjutkan persidangan kasus Novanto. Wakil Ketua MKD, Junimart Girsang pun membenarkan hal itu.

“Rapat anggota (MKD) sepakat bahwa masalah *legal standing*, *clear*. Maka kita lanjutkan, memutuskan bahwa persidangan ini bisa kita lanjutkan,” kata Junimart, di Gedung Nusantara II, Selasa (24/11/15).

Pada rapat sebelumnya MKD memutuskan menunda membawa kasus Setya ke persidangan. Mayoritas anggota dan pimpinan MKD mempersoalkan *legal standing* Menteri ESDM sebagai pelapor.

Rencananya, MKD akan menggelar rapat pleno kembali pada Senin (30/11/2015). Dalam rapat tersebut,



Ketua DPR RI Setya Novanto

MKD akan menyusun jadwal sidang termasuk siapa saja pihak-pihak yang akan dipanggil untuk digali keterangannya. MKD akan menyelenggarakan sidang dengan cara terbuka dan tertutup secara proporsional. (SF), FOTO : DENUS/PARLE/HR.

INDONESIA DAN JEPANG MILIKI PERAN VITAL DI ASEAN



Ketua DPR Setya Novanto berjabat tangan dengan Former Minister of Economy, Trade and Industry and Chairman of General Council of Liberal Democratic Party of Japan, Mr Toshihiro Nakai

Ketua DPR Setya Novanto menerima kunjungan 21 Anggota Parlemen Jepang. Delegasi Parlemen Jepang itu dipimpin oleh Former Minister of Economy, Trade and Industry and Chairman of General Council of Liberal Democratic Party of Japan, Mr Toshihiro Nakai.

Dalam kesempatan ini, Novanto didampingi Wakil Ketua DPR Fadli Zon, Ketua BURT Roem Kono, Wakil Ketua Komisi V Muhidin M Said, dan Anggota Komisi XI DPR Nurdin Tampubolon. Hadir pula Duta Besar masing-masing kedua negara. Pertemuan berlangsung di Ruang Pimpinan, Gedung Nusantara

III, Selasa (24/12/15) sore.

Dalam pertemuan, Novanto menyampaikan, bahwa dalam kunjungan DPR ke Jepang minggu lalu, Kaisar Akihito mengakui pentingnya hubungan kedua negara. Kedua negara memiliki hubungan yang memiliki nilai historis, yang harus didukung oleh Parlemen secara lebih aktif di masa depan.

“Ketua Parlemen Jepang, Oshima Tamori dan Majelis Tinggi Jepang, Yamazaki Masaaki, dan juga PM Shinzo Abe mengakui peran Indonesia-Jepang yang vital di kawasan, terutama dalam ASEAN, dan menjaga keamanan maritim dan stabilitas kawasan, sehingga harus dipelihara dengan baik,” tambah politisi F-PG itu.

Selain itu, lanjut politisi asal dapil NTT itu, kerjasama di bidang ekonomi, investasi di berbagai bidang, terutama manufaktur dan infrastruktur tentu perlu ditingkatkan di masa-masa yang akan datang.

Usai pertemuan, delegasi yang seluruhnya berjumlah lebih dari 260 orang, diajak untuk meninjau Ruang Paripurna di Gedung Nusantara, dilanjutkan dengan jamuan *afternoon tea* di Gedung Nusantara IV. (SF), FOTO : DENUS/PARLE/HR.

BAKAMLA MILIKI PERAN STRATEGIS MENJAGA KEAMANAN LAUT INDONESIA

Rapat Paripurna DPR, Selasa (24/11) telah resmi menyetujui Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI) menjadi Mitra Kerja Komisi I. Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan bahwa dasar pembentukan Bakamla merujuk pada Pasal 59 ayat (3) Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.

Sejak disahkan UU Kelautan, Badan Koordinasi Keamanan Laut resmi berganti nama menjadi Bakamla. Kedudukan Bakamla pun diperkuat dengan diterbitkannya Peraturan Presiden (PP) Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut.

“Bakamla merupakan amanat dari UU, saya kira kalau masalah laut kita lihat secara *de facto* saja. Laut kita itu banyak sekali kekosongan-kekosongan pengamanannya, sehingga kita sangat mendukung adanya Bakamla. Laut kita ini luar biasa panjangnya sehingga perlu ada satu organisasi, lembaga, atau badan yang menangani ini secara komprehensif,” ungkap Fadli Zon.

Dalam Pasal 59 ayat 3 UU No.32 tahun 2014 tentang Kelautan menyebutkan bahwa, “Dalam rangka penegakan hukum di wilayah perairan dan



Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon

wilayah yurisdiksi, khususnya dalam melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia, dibentuk Badan Keamanan Laut.

Fadli Zon menilai bahwa walaupun masih terdapat tumpang tindih badan yang menangani masalah kelautan, namun akan dibenahi secara perlahan. Sebagaimana diketahui, penanganan penegakkan hukum di laut terdapat

Polisi Air, Angkatan Laut serta Bakamla. “Tapi menurut saya perlu ada badan dulu supaya bisa dianggarkan dalam APBN-P 2016,” ungkapnya.

Sebagaimana diketahui Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) awalnya dibentuk pada 1972 berdasarkan keputusan beberapa instansi. Yakni, Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata, Menteri Perhubungan, Menteri Keuangan, Menteri Kehakiman, dan Jaksa Agung.

Namun, DPR RI dan pemerintah berhasil membuat UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan yang isinya antara lain pembentukan Bakamla. Sejak Nomor UU 32 Tahun 2014 disahkan itulah Bakorkamla berganti menjadi Bakamla. Pembentukan Bakamla sekaligus memperkuat komitmen pemerintah menjadikan dan memperkuat bidang maritim.

“Bakamla memiliki peran strategis sebagai badan yang melakukan koordinasi dengan instansi lain dalam rangka pengamanan laut Indonesia yang sangat strategis. Sehingga tindak pidana kejahatan di perairan laut Indonesia dapat dicegah,” tegasnya. (SKRI, FOTO : IWAN ARMANIAS/PARLE/HR.



Anggota Komisi V DPR, Yoseph Umar Hadi

Anggota Komisi V DPR, Yoseph Umar Hadi menyangkan kasus pencatut-

KASUS PENCATUTAN BERPENGARUH NEGATIF PADA CITRA DPR

an nama Presiden Joko Widodo yang diduga dilakukan Ketua DPR Setya Novanto, telah memberikan pengaruh negatif terhadap citra DPR. Sehingga, persoalan ini harus segera dituntaskan.

Demikian dikatakan Yoseph saat menyampaikan interupsi, pada Rapat Paripurna, di Gedung Nusantara II, Selasa (24/11/15). Paripurna mengagendakan tentang Pengesahan Badan Keamanan Laut menjadi mitra kerja Komisi I DPR. Rapat dipimpin Wakil Ketua DPR, Fadli Zon.

“Kasus ini memberikan dampak yang sangat negatif terhadap citra kelem-

bagaan dewan. Karena ini persoalan yang perlu mendapatkan suatu klarifikasi yang tuntas, maka saya ingin menyatakan, rasa keprihatinan yang sangat mendalam,” kata Yoseph.

Politisi F-PDI Perjuangan ini menambahkan, karena persoalan yang muncul akhir-akhir ini, terutama terkait dengan kredibilitas dewan, bukan hanya mempertaruhkan kredibilitas legislatif, tapi juga kredibilitas eksekutif, terutama pemerintahan.

“Untuk itu, saya meminta kepada Pimpinan DPR, agar persoalan ini segera dituntaskan, melalui Mahkamah Kehormatan Dewan, yang kita percaya

untuk mengklarifikasi dan memverifikasi mengenai benar tidaknya laporan Menteri ESDM, yakni pengaduan salah satu Anggota kita yang banyak diberitakan media massa,” pinta Yoseph.

Politisi asal dapil Jawa Barat VIII ini juga berharap, MKD untuk betul-betul menjalankan tugas dengan sebaik-

baiknya, dalam rangka untuk mengklarifikasi dan memverifikasi permasalahan ini.

“Ini perlu kita perhatikan dan jaga dalam pelaksanaan verifikasi, sehingga berjalan dengan baik,” harap Yoseph.

Hal senada diungkapkan Anggota Komisi XI DPR, Johnny G. Plate (F-Nas-

dem). Ia berharap MKD dapat menjaga marwah dan martabat Parlemen.

“Agar MKD bekerja dengan *full disclosure* (pengungkapan penuh), agar marwah dan martabat lembaga ini bisa kita sama-sama jaga,” harap politisi asal dapil NTT itu. (SF), FOTO : JAKA NU-GRAHA/PARLE/HR.

Bakamla Disetujui Jadi Mitra Kerja Komisi I



Wakil Ketua DPR Fadli Zon didampingi Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan saat memimpin Sidang Paripurna

Rapat Paripurna DPR RI menyetujui Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI sebagai mitra baru Komisi I. Badan ini kelak mengintegrasikan semua institusi yang terkait dengan maritim, seperti Polri, Basarnas, TNI AL, dan lain-lain.

Rapat Paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon itu secara aklamasi menyetujui pembentukan badan baru sebagai mitra Komisi I. Se-

belumnya, dalam rapat konsultasi antara Pimpinan DPR dengan Pimpinan fraksi-fraksi telah menyepakati pembentukan badan baru ini. Dasar hukum pembentukan badan baru ini adalah UU No.32/2014 tentang Kelautan. Pasal 59 ayat (3) UU tersebut mengamanatkan perlu dibentuk Bakamla yang bertugas melakukan pengamanan dan penyelamatan laut.

Usulan mitra kerja baru ini sempat

diinterupsi oleh Yandri Susanto (F-PAN), karena akan tumpang tindih dengan badan lain. Urgensi pembentukan badan baru ini dipertanyakan, karena sudah ada TNI AL, Polri, Basarnas, yang semuanya bekerja di laut.

Yoseph Umar Hadi (F-PDI Perjuangan) dalam interupsinya menyatakan, justru keberadaan badan baru ini sangat penting dan strategis. Badan ini merupakan amanat UU yang harus segera dibentuk. “Badan ini sangat strategis dan penting dalam menjaga keamanan laut kita dari *illegal fishing*, *illegal logging*, *human trafficking*, dan lain-lain. Menurut saya badan ini perlu diperkuat sehingga menjadi badan yang betul-betul memiliki kinerja dan kemampuan kapasitas yang kita harapkan dalam menjaga keamanan laut,” kata Yoseph.

Badan ini, kata Yoseph, tidak akan tumpang tindih keberadaannya dengan badan lain. Justru badan ini ini mengintegrasikan semua instusi kelautan dalam satu atap dan bertanggung jawab kepada presiden. Bahkan ada UU lain yang mengamanatkan perlunya dibentuk badan ini, yaitu UU No.17/2008 tentang Pelayaran. Badan yang disebut juga dengan *Sea and Coast Guard* itu, akan menyatukan Polisi Air, TNI AL, Basarnas, dan Bea Cukai. (MH)/FOTO: IWAN ARMANIAS/PARLE/IW.

PANSUS RUU MINOL DIHARAPKAN UNDANG KALANGAN GURU

Anggota Pansus RUU Larangan Minuman Beralkohol (Minol) Samsu Niang mengusulkan kalangan guru diundang atau diminta masukannya dalam rangka pembahasan RUU tersebut. Organisasi profesi guru seperti Persatuan Guru (PGRI), Persatuan Guru Swasta Indonesia (PGSI) atau Federasi Guru Independen Indonesia (FGII) dilibatkan dalam pembahasan sebab nantinya pelaku minuman beralkohol

kebanyakan adalah siswa-siswa.

“Karena itu guru-guru harus diberi pemahaman dan bisa mensosialisasikan UU Minol kepada para siswa dan guru adalah pendidik atau garda terdepan pembinaan anak bangsa,” katanya dalam raker Pansus RUU Minol dengan Menteri Perdagangan dan Menteri Perindustrian Rabu (25/11) di Senayan, Jakarta.

Perlunya melibatkan para pendidik, kata politisi PDI Perjuangan ini karena

mereka adalah pelaku dan pembina bagi para siswa yang umumnya sangat rentan dan mudah terpengaruh dengan minuman keras atau beralkohol. Termasuk minimal oplosan, yang sering diberitakan korbannya semakin banyak dari kalangan anak muda.

Minuman oplosan selain harganya murah, barang haram tersebut mudah didapatkan hingga warung-warung kecil di pedesaan. Karena itu, Samsu

berharap Pansus dapat menggelar rapat dengar pendapat dengan kalangan pendidik tersebut untuk memberikan pencerahan dan pemahaman sehingga generasi muda bangsa tidak terjerumus pada minuman yang membahayakan tersebut.

Enam kementerian terlibat dalam pembahasan RUU Minol ini yakni Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, Menteri Agama, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Keuangan dan Men-



Anggota Pansus RUU Minol Samsu Niang

teri Kesehatan. Anggota Pansus lainnya juga mengusulkan untuk mengundang ormas-ormas yang akrab dengan pemberantasan miras seperti FPI dan HTI serta ormas lainnya. Ketua Pansus Arwani Thomafi menyatakan, prinsipnya Pansus terbuka sehingga bisa dalam rangka kunker atau forum lain, ormas-ormas tersebut diundang guna diminta masukannya. (MP), FOTO : IWAN ARMANIAS/PARLE/HR.

PLENO BALEG SETUJUI RUU SISTEM PERBUKUAN



Pimpinan Baleg menerima Pendapat Akhir Fraksi Partai Demokrat

Rapat Pleno Badan Legislasi DPR RI Rabu (25/11/2015) dipimpin Ketua Baleg Sarehwiyono menyetujui RUU Sistem Perbukuan hasil harmonisasi Panja RUU Sistem Perbukuan Baleg, untuk selanjutnya RUU ini akan diteruskan dalam Rapat Paripurna DPR untuk ditetapkan menjadi RUU Usul Inisiatif DPR RI.

“Apakah RUU Sistem Perbukuan sebagai hasil pengharmonisasian Panja dapat kita setujui dan diteruskan ke Rapat Paripurna DPR,” kata Sareh di Ruang Rapat Baleg, Gedung Nusantara I DPR RI, Jakarta. Seluruh anggota Baleg yang hadir dalam rapat pleno tersebut menyatakan persetujuannya.

Sebelumnya, Ketua Panja RUU Sistem Perbukuan Firman Subagyo menyampaikan laporannya. Firman menyatakan, bahwa Panja telah selesai melakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi terhadap RUU Sistem Perbukuan secara mendalam, dan Panja menyerahkan pada Rapat Pleno Baleg untuk diambil keputusan.

“Berdasarkan teknis perumusan dan substansi RUU ini, Panja berpendapat RUU Sistem Perbukuan sudah dapat diajukan sebagai RUU Usul Inisiatif DPR. Namun demikian Panja menyerahkan kepada keputusan Pleno pada hari ini. Apakah rumusan RUU hasil harmonisasi yang telah dihasilkan panja dapat diterima,” jelas Firman yang juga sebagai Wakil Ketua

Baleg pada rapat pleno tersebut.

Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Rufinus Hutauruk juru bicara Fraksi Hanura menyatakan Fraksi Hanura meyetujui RUU Sistem Perbukuan untuk dilakukan pengambilan keputusan dan ditindak lanjuti sesuai peraturan yang berlaku.

Menurutnya, industri buku di Indonesia perlu dikembangkan dan diperkuat dengan memberikan proteksi dan perlindungan hukum melalui Undang-Undang yang mendorong pertumbuhan penciptaan gagasan baik penulis, pengarang dan penerjemah, penerbit, percetakan, penyalur dan masyarakat itu sendiri.

“Untuk itu dalam RUU Sistem Perbukuan diharapkan dapat membangun dan memperkokoh industri buku nasional, mengatur dan mewujudkan tata kelola perbukuan, meningkatkan jumlah dan mutu sumber daya perbukuan serta meningkatkan ketersediaan, pendistribusian buku secara merata

dan dengan harga yang terjangkau oleh semua lapisan masyarakat,” papar Rufinus.

Senada dengan Rufinus, Bahrum Daido juru bicara Fraksi Partai Demokrat menyatakan kehadiran RUU Sistem Perbukuan sebuah urgensi yang tak terelakkan. “Demi memberikan kontribusi di bidang legislasi dan keberpihakan kepada masyarakat yang memiliki hak untuk menikmati akses terhadap buku-buku bermutu, dan menumbuhkembangkan rasa cinta pada tanah air, membentuk karakter bangsa, membangun toleransi dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan diantara anak bangsa, sekaligus memberikan ruang kreativitas intelektual bagi insan penulis dan peneliti serta untuk memperkuat industri perbukuan nasional, maka kehadiran RUU Sistem Perbukuan sebuah urgensi yang tak terelakkan,” papar Bahrum.

RUU Sistem Perbukuan merupakan RUU Usul Inisiatif Komisi X DPR RI yang disampaikan kepada Badan Legislasi DPR untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi, dan sesuai peraturan berlaku selanjutnya akan diteruskan kepada Rapat Paripurna DPR RI untuk diambil keputusan sebagai RUU Usul Inisiatif DPR RI.

(SC), FOTO : JAKA NUGRAHA/PARLE/HR.



Wakil Ketua Komisi VI DPR Heri Gunawan

Inalum sebagai Perusahaan BUMN pada prakteknya belum mendapatkan *support* yang riil khususnya di tataran Pemda, hal ini bisa terlihat dari adanya ketidak sepehaman antara Inalum dengan Pemda di Sumatera terutama terkait pajak air permukaan.

Demikian dikatakan Wakil Ketua Komisi VI DPR Heri Gunawan disela-sela Rapat Kerja dengan Jaksa Agung Muda yang dipimpin Wakil Ketua Azam Azman Natawijaya di Gedung Nusantara I Senayan, Jakarta, Rabu (24/11).

Heri mengatakan, pajak air permukaan untuk pembangkit listrik Inalum berdasarkan tarif industri, sedangkan

PT INALUM BISA BANGKRUT KARENA PAJAK DAERAH

Inalum memohon penerapan berdasarkan tarif pembangkit listrik.

Dari Pemprov, Inalum (Asahan 2) ditagih pajak air permukaan (PAP) berdasarkan tarif industri progresif sebesar Rp.1.444/m³, sehingga dalam pajak daerah (SKPD) lebih dari Rp500 milyar. Hal ini sangat memberatkan, dan Inalum bisa bangkrut karena pajak Daerah ini.

Padahal lanjut Heri, PAP untuk pembangkitan listrik yang dijual ke PLN yang berdasarkan kepada Asahan 1 berdasarkan tarif Rp.7,5/Kwh. Pemprovsu sebenarnya sudah pernah minta BPKP Sumut mengkaji beberapa besaran PAP yang wajar untuk pembangkitan listrik kepentingan sendiri atas Inalum yaitu Rp.19,8/Kwh. Inalum sudah setuju dan bersedia membayar sesuai kajian BPKP tersebut diminta 240% lebih besar dari PAP untuk pembangkitan listrik yang dijual ke PLN Rp7,5/Kwh.

Heri Gunawan mengemukakan, tarif PAP untuk pembangkitan listrik di Provinsi lain berkisar antara Rp5 sam-

pai dengan Rp10/Kwh. Sesuai dengan Perda dan Pergubsu, Inalum mengajukan Surat keberatan dengan terlebih dulu membayar PAP sesuai perhitungan wajib pajak sendiri yaitu Rp7,5/Kwh tapi Pemprov menolak surat keberatan tersebut.

Saat ini Inalum masih meminta *Legal Opinion* dari Jamdatun karena sebenarnya secara lisan Plt Gubsu setuju dengan kajian BPKP. Selain itu Inalum masih melakukan pembicaraan dengan pihak Dispenda untuk membuat Mou agar Inalum dapat membayar kekurangan dari kajian BPKP dibandingkan tarif ke PLN Asap. Dispenda sebelumnya mencabut surat penolakan atas keberatan Inalum supaya tidak harus ke Pengadilan Pajak.

Sesuai kajian BPKP Inalum per tahun akan membayar PAP sekitar Rp.86 milyar. Selain itu Inalum masih akan membayar PBB, Pajak Penerangan dan Jalan (PPJ), Izin Gangguan dan retribusi lain sesuai Perda yang ada. (SPY,MP), FOTO : ANDRI/PARLE/HR.

HELIKOPTER PRESIDEN SEBAIKNYA PRODUK DALAM NEGERI

Presiden Jokowi kemungkinan akan mengganti helikopter Super Puma dengan helikopter jenis Agusta Westland AW101. Heli jenis Super Puma sudah digunakan selama 13 tahun Presiden, yakni dibuat tahun 2000 dan dipakai sejak 2002.

Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin sebelum menghadiri Rapat Paripurna DPR, Selasa (24/11/2015) menyampaikan dukungannya atas rencana penggantian helikopter Presiden dan menjadi sarana transportasi Presiden ketika mengunjungi daerah-daerah terpencil di Indonesia. "Demi keamanan sudah selayaknya diganti helikopter yang menjadi tunggangan Presiden," ungkap TB Hasanuddin.

Namun, TB Hasanuddin meminta agar pemerintah mempertimbangkan pembelian helikopter AW101 buatan Italia. Penggantian helikopter presiden tak harus dengan Agusta Westland AW101. Apalagi dari segi harga, Super Puma lebih murah daripada helikopter buatan Italia tersebut. "Kenapa bukan Super Puma terbaru yang merupakan buatan anak negeri," ungkapnya.

"Heli ini (AW101) memang cukup canggih dengan interior yang mewah dan *space* yang lebar. Sehingga cukup nyaman untuk dipakai oleh VVIP. Tapi harganya, menurut informasi sekitar US\$ 55 juta, Cukup mahal bila dibandingkan dengan Super Puma yang harganya hanya US\$ 35 juta, sehingga harga satu



Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin

unit Super Puma, maksimal sekitar US\$ 40 juta. Dengan membeli produk dalam negeri, maka negara untung sebesar 30 persen dari harga dasar, setidaknya dalam bentuk material dari dalam negeri," terang Hasanuddin.

Lebih lanjut, Politisi Partai PDI Per-

juangan ini menegaskan bahwa perawat dan pengadaan suku cadang Super Puma buatan dalam negeri akan lebih murah dan terjamin. "Tidak seperti AW101, yang pasti lebih mahal dalam status impor," terangnya.

Bukan hanya itu, jelasnya dengan status impor tersebut, bisa jadi Indonesia sewaktu-waktu akan terkena embargo, sehingga tidak bisa mendatangkan suku cadang dan perawat.

"Kalau bangga dengan Indonesia, belilah produk dalam negeri Super Puma

terbaru. Produk PT DI adalah Jenis EC 225 yang lebih besar dan di *customize* untuk menjadi VVIP kepresidenan," jelasnya.

TB Hasanuddin yang juga Anggota Komisi I ungkapkan bahwa Super Puma EC 225 sudah di gunakan oleh banyak negara. Bahkan digunakan, sebagai helikopter kepresidenan di negara lain.

"Saat ini sudah 32 kepala negara dan Kerajaan di dunia menggunakan EC-225. Sedangkan AW-101 hanya digunakan oleh 4 kepala negara saja. Bangsa asing

saja bangga. Mengapa kita tidak bangga dengan produk anak bangsa sendiri," tanyanya.

Hasanudin mengingatkan sebelum membeli helikopter kepresidenan AW-101 pemerintah sebaiknya melihat Undang Undang nomor 16 tahun 2012 tentang industri pertahanan.

"Pasal 43 menyatakan tidak dibenarkan membeli alat pertahanan dan keamanan dari luar negeri selama negara sudah mampu memproduksi," tegasnya.

(SKR), FOTO : IWAN ARMANIAS/PARLE/HR.

Pengaturan Minol Secara Spesifik dalam UU Khusus Sangat Penting

Panitia Khusus yang bertugas membahas RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol (Minol) menegaskan, pengaturan minol secara spesifik dalam suatu UU sangat penting. Pasalnya tingkat konsumsi minol pada generasi muda semakin tinggi, sudah banyak korban jiwa secara masal dan dalam waktu bersamaan terutama untuk kategori minuman oplosan.

Demikian dikemukakan Wakil Ketua Pansus RUU Minol Lili Asdjuredja ketika membacakan penjelasan Pansus DPR terhadap RUU Larangan Minuman Beralkohol dalam raker dengan 6 Kementerian di Ruang Pansus B, Gedung Nusantara II, Senayan (25/11).

Dalam acara yang dipimpin Ketua Pansus Arwani Thomafi, Lili lebih lanjut mengatakan, kini akibat meningkatnya konsumsi minuman beralkohol kriminalitas juga makin meningkat sehingga mengganggu ketenteraman dan rasa aman masyarakat.

Sebelumnya politisi Golkar yang juga

anggota Komisi VI DPR ini mengatakan, UUD 45 mengamanatkan bahwa setiap warga negara mempunyai hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Untuk itu menjadi kewajiban negara untuk menjamin terciptanya lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi warganya.

Salah satu upaya untuk terciptanya lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah melalui pengaturan, pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol. Karena mengkonsumsi minol dapat berdampak negatif pada kesehatan dan sosial. Dari segi kesehatan dapat menimbulkan gangguan mental organik, merusak saraf dan daya ingat serta pembengkakan otak. Dari segi sosial, biasanya orang mabuk karena alkohol akan merusak tatanan sosial masyarakat.

Menteri Perdagangan Thomas Tri-kasih Limbong yang didampingi Men-perin Saleh Husin dan beberapa wakil kementerian mengatakan, minol saat



Wakil Ketua Pansus RUU Minol Lili Asdjuredja

ini telah diatur dalam berbagai peraturan perundangan dari UU hingga Perda. Namun ia memahami pembentukan UU ini dimaksudkan untuk menjadi landasan hukum yang komprehensif melalui UU tersendiri. "Pemerintah prinsipnya sepakat dan siap membahas RUU Minol ini," tutup Mendag.

Pansus berharap, mengingat waktu yang terbatas, RUU Minol yang dibahas dalam tiga masa sidang ini bisa diundangkan pada masa Sidang IV tahun 2015-2016. (MPI), FOTO : IWAN ARMANIAS/PARLE/HR.

REKRUTMEN CALON KEPALA DAERAH MINIM PEREMPUAN

Rekrutmen kepala daerah dan kampanye Pilkada serentak saat ini ternyata masih kering dari isu-isu gender. Kaum perempuan masih sulit mendapatkan akses rekrutmen menjadi calon kepala daerah. Prosentase keikutsertaan perempuan di panggung politik pun sangat minim.

Demikian diungkapkan Anggota DPR RI Hetifah Sjaifudian usai menjadi pembicara dalam diskusi yang membincang perempuan dan politik di DPD RI, Selasa (24/11). Menurutnya, konten kampanye para calon kepala daerah sangat minim membincang tentang kesejahteraan kaum perempuan dan anak. Padahal, ini

sektor yang sangat penting di tengah kehidupan sosial kemasyarakatan.

Perempuan juga, sambung Anggota F-PG ini, masih dibatasi keikutsertaannya dalam rekrutmen calon kepala daerah. Kecuali kaum perempuan yang memiliki hubungan kekerabatan dengan kepala daerah, mereka baru bisa

direkrut menjadi calon kepala daerah. Selebihnya sangat minim keterlibatan perempuan di panggung politik daerah maupun nasional.

“Banyak perempuan yang aktif di parpol dan memiliki kompetensi baik, namun ketika mereka ingin mencalonkan diri, ternyata memilih untuk tidak menjadi calon, baik di Pileg maupun di Pilkada. Kesempatannya terbatas sekali. Mereka merasa untuk menjadi calon banyak prosesnya yang sulit dipenuhi,” ujar Hetifah.

Selama ini, sambung Anggota Komisi II itu, panitia seleksi Pilkada juga minim keterlibatan perempuan. Sehingga penyusunan kriteria calon kepala daerah dirasa kurang bersahabat dengan perempuan. “Tidak ada kemudahan atau bersahabat terhadap kaum perempuan dalam proses rekrutmen itu. Kecuali jika si perempuan punya keterikatan hubungan yang baik dengan elit partai. Kalau punya keterikatan hubungan (oli-



Anggota DPR Hetifah Sjaifudian

garki), itu kesempatan bagi dia untuk tercalonkan.”

Mencermati perkembangan mutakhir politik di daerah, Hetifah melihat sangat dilematis dan paradoks. Perempuan baru bisa mendapat kesempatan bila

memiliki hubungan kekerabatan dengan kepala daerahnya. Hal lain yang juga disorot Hetifah adalah muatan kampanye para calon. Selama ini hanya sektor infrastruktur yang diangkat menjadi isu utama pembangunan di daerah. Isu kesejahteraan perempuan sangat minim.

Hetifah mencontohkan, fasilitas kesehatan reproduksi bagi perempuan dan pembangunan posyandu tidak menjadi isu penting dalam kampanye para calon kepala daerah. Para calon hanya mementingkan pembangunan fisik yang bisa dilihat masyarakat, seperti pembangunan jalan, sekolah, dan lain-lain.

“Para kandidat mungkin kurang memberi perhatian terhadap isu-isu perempuan dan anak. Perlu ada pendidikan politik bagi para pemilih dan juga perlu memberi masukan kepada para calon kepala daerah agar bisa memberi jawaban dan solusi bagi isu perempuan dan anak,” imbuh Hetifah lagi. (MH), FOTO : RISKAPARLE/HR.

JUMLAH PENDONOR KIAN MENINGKAT



Suasana donor darah memperingati HUT KORPRI ke 44

Jumlah Pendonor darah di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI kian meningkat. Ini bukti kepedulian para pegawai juga semakin tinggi.

Setidaknya sudah lebih dari 250 kantong darah terisi dari

para pendonor yang datang beramai-ramai ke lokasi donor darah di Lobby Nusantara, Rabu (25/11), yang diselenggarakan KSDDDPI (Keluarga Sehat Donor Darah Parlemen Indonesia) dan KORPRI DPR bekerjasama dengan PMI. Aksi donor darah ini merupakan rangkaian dari berbagai kegiatan menyambut Hari Ulang Tahun KORPRI yang ke-44 tahun.

Achmad Djuned Deputy Bidang Administrasi Sekretarian Jenderal DPR, usai mendonorkan darahnya, mengapresiasi antusiasme para pegawai. “Alhamdulillah peserta donor darah semakin lama semakin meningkat. Dan peningkatannya cukup signifikan. Artinya, teman-teman di Setjen sudah menyadari kepedulian terhadap kesehatan. Dengan banyaknya pendonor, tingkat kesehatan para pegawai juga semakin bagus,” ungkap Djuned.

Aksi donor darah ini sudah rutin digelar secara berkala, baik oleh Setjen DPR maupun KORPRI. Biasanya acara donor darah ini digelar bersamaan dengan momentum ulang tahun dan momentaum acara penting lainnya. (MH), FOTO : JAKA NUGRAHA/PARLE/HR.

KASUS DI MKD BISA DIPROSES TANPA PENGADUAN

Perdebatan soal pihak yang harus mengadukan pelanggaran etika ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR, bisa segera diakhiri. Bila tafsir Pasal 5 ayat (1) Peraturan DPR No.2/2015 masih dipersoalkan, MKD tetap bisa memproses kasus pelanggaran etika tanpa ada pengaduan.

Anggota MKD Syarifuddin Sudding (F-Hanura) menyatakan hal ini sebelum mengikuti Rapat Paripurna, Selasa (24/11). Sudding menyampaikan pandangannya kepada pers yang menanyakan soal kategori pihak pengadu seperti diatur dalam Peraturan DPR. MKD, kata Sudding, sudah pernah bekerja tanpa



Anggota MKD Sarifuddin Sudding

pengaduan dalam kasus kehadiran Ketua DPR di kampanye calon Presiden Amerika Donald Trump beberapa waktu lalu.

“Kasus Donal Trump kemarin kita tindaklanjuti tanpa pengaduan, karena diatur dalam pasal 4 hukum acara kita. Kasus ini sudah diberitakan secara masif dan mendapatkan perhatian publik.

Sementara kasus dugaan pencatutan nama presiden oleh Ketua DPR dapat pula ditindaklanjuti tanpa pengaduan seperti kasus Donald Trump. Bahkan, kasus ini lebih dahsyat daripada kasus Donal Trump,” jelas Sudding.

Bukti permulaan kasus ini, sambung Sudding, akan dikonfirmasi kepada pihak-pihak terkait yang ada dalam reka-

man. “Ini adalah pertarungan terhadap alat kelengkapan dewan yang namanya Mahkamah Kehormatan Dewan. Ketika kasus ini tidak ditangani secara baik, atau MKD tidak bisa lagi menjaga martabat dan keluhuran dewan, saya kira MKD dibubarkan saja,” tandas Sudding menutup wawancara. (MHI/FOTO:IWAN ARMANIAS/PARLE/IW.

ARZETTY BERSIKAP KOOPERATIF DALAM SIDANG MKD

Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR memeriksa Anggota Komisi VIII DPR, Arzetty Bilbina. Politisi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa itu yang melakukan pertemuan dengan mantan Komandan Kodim 0816 Sidoarjo Letkol Kav Rizeki Indra Wijaya di Hotel Arjuna Lawang, Malang, Jawa Timur, beberapa waktu yang lalu.

“Kami baru mendengarkan klarifikasinya. Semua dijelaskan secara jujur oleh beliau, dan sangat kooperatif,” kata Ketua MKD DPR, Surahman Hidayat, usai sidang, di Gedung Nusantara II, Selasa (24/11/15).

Setelah pemeriksaan ini, tambah politisi F-PKS itu, Pimpinan MKD segera membahas langkah-langkah selanjutnya. MKD juga tak menutup kemungkinan memanggil mantan Komandan Kodim 0816 Sidoarjo Letkol Kav Rizeki Indra Wijaya.

“Itu kan nanti dibahas di Pimpinan (MKD), apakah cukup, apa belum, apa mau menggali lagi dari pihak terkait. Apakah (Dandim) dipanggil atau tidak masih harus dibahas,” tutur politisi dari dapil Jawa Barat itu.

Hal senada diungkapkan Wakil Ketua MKD, Sufmi Dasco Ahmad (F-Gerindra). Sufmi menyatakan, Arzetty sudah mengklarifikasi tentang apa yang diberitakan selama ini, dalam versi dirinya. Pemanggilan ini juga masih dalam tahap klarifikasi.

“Masih klarifikasi laporan dari masyarakat, belum masuk pokok perkara. Arzetty kooperatif bercerita seperti diberitakan di media massa. Tapi detilnya saya tidak bisa ungkap,” kata politisi asal dapil Banten itu.

Sedikit berbeda diungkapkan Anggota MKD, Syarifudin Sudding. Ia menilai, Arzetty tak bisa menjawab secara lancar saat diklarifikasi oleh para Pimpinan dan Anggota MKD.

“Sepertinya sedikit tidak siap menghadapi sidang di MKD. Dia sedikit gelagapan memberikan jawaban,” kata Sudding.

Namun, politisi Hanura itu enggan mengungkapkan apa



Anggota Komisi VIII DPR, Arzetti Bilbina

saja penjelasan Arzetty karena sudah menyangkut pokok perkara. Sudding hanya menjelaskan bahwa MKD memutuskan kasus Arzetty ini tanpa aduan, karena sudah menjadi sorotan publik.

“Selanjutnya, kita akan panggil pihak-pihak terkait, termasuk suaminya. Bisa juga kita lakukan rekonstruksi,” imbuh politisi asal dapil Sulawesi Tengah itu.

Sangat disayangkan, usai sidang, Arzetty pun enggan memberikan keterangan kepada awak pers yang sudah menunggunya, soal pemeriksaannya ini.

Sebagaimana diberitakan di berbagai media massa, pada akhir Oktober 2015, Arzetty mengaku sengaja bertemu dengan Rizeki di kamar Hotel Arjuna Lawang, Malang, Jawa Timur. Ia khawatir, jika pertemuan itu dilakukan di tempat umum, dirinya justru sibuk meladeni sesi foto dengan warga. Pertemuan itu dikabarkan bertujuan untuk membahas soal dana pembangunan masjid. (SF), FOTO : DENUS/PARLE/HR.

PENYALURAN KUR JANGAN SEKADAR MENGEJAR TARGET

Penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) hendaknya dilakukan dengan terencana dan matang. Jangan hanya mengejar target penyaluran. Akses mendapatkan KUR bagi para pelaku usaha kecil menengah (UKM) pemula juga mesti dipermudah.

Anggota Komisi VI DPR RI Endang Srikarti Handayani (F-PG) mengemukakan hal tersebut sesaat sebelum mengikuti Rapat Paripurna DPR, Selasa (24/11). “KUR sudah ditunggu oleh masyarakat, khususnya wirausahawan pemula maupun yang sudah lama.

Ada target anggaran KUR, memang, yang harus disalurkan. Idealnya KUR sudah tersalurkan hingga 80% sampai 2015. Namun, jangan asal kejar target, sehingga penyalurannya tidak terkontrol,” kata Endang.

Perlahan tapi pasti, KUR harus ter-

salurkan secara merata ke seluruh wilayah Indonesia. Yang penting pula dalam penyaluran KUR adalah pendampingan dan pengawasan. Masyarakat pelaku UKM harus diberi pemahaman bahwa KUR itu bukan hibah. Ia tetaplah pinjaman bank. Hanya saja bunganya ditekan sekecil mungkin, agar tak memberatkan pelaku UKM.

Bunga KUR, lanjut Endang, sudah diturunkan dari 22% menjadi 12%. Dan akan diturunkan lagi hingga 9%. “Tentu saya mengapresiasi pemerintah terutama kepada bank-bank pemerintah yang ditunjuk untuk menyalurkan KUR kepada masyarakat. Pemerintah sudah mendapat suntikan dana dari Tiongkok untuk memperkuat posisi keuangan bank-bank plat merah tersebut.

“Bantuan pinjaman dari Tiongkok itu, selain untuk infrastruktur juga untuk KUR. Untuk apa lagi selain KUR,”



Anggota Komisi VI DPR Endang Srikarti Handayani

ungkap politisi dari dapil Jateng V tersebut. Pemerintah, harap Endang, perlu mengampanyekan penyaluran KUR ini lewat iklan media bahwa ada program penyaluran KUR yang bisa dimanfaatkan masyarakat. Tanpa itu,

masyarakat tidak banyak tahu.

Ditambahkan Endang, semua pelaku UKM yang sudah berbadan hukum bisa segera mengakses KUR. Bila ada UKM yang belum berbadan hukum, pemerintah harus membantunya. Dengan begitu legitimasi usahanya bisa diakui dan mendapat kemudahan akses KUR. Endang juga mengingatkan tentang pemberlakuan MEA akhir tahun ini. Akan terjadi persaingan usaha yang luar biasa seiring pemberlakuan MEA tersebut.

Para pelaku UKM harus mendapat pendampingan dari pemerintah, selain kemudahan akses KUR, juga pendampingan dalam produksi. Label standarisasi mutu dan kemasan perlu diperbaiki lagi, karena hasil produknya akan bersaing dengan produk UKM dari negara-negara ASEAN lainnya.

(MH)/FOTO:IWAN ARMANIAS/PARLE/HR.

PEMERINTAH HARUS SERIUS SIKAPI PENGURANGAN EMISI KARBON



Wakil Ketua Komisi VII DPR Satya Widya Yudha

Emisi karbon memiliki dampak buruk bagi bumi. Bahaya emisi karbon ini menghasilkan efek pemanasan global pada iklim bumi. Akibatnya, bumi jadi lebih panas. Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Satya Widya Yudha mendesak Pemerintah serius terhadap pengurangan emisi karbon, melalui pengalokasian dana dan mengimplementasikan Undang-Undang tentang Lingkungan

Hidup serta peraturan perundangan yang berlaku lainnya.

“Kita harapkan Pemerintah serius mengenai pengurangan emisi ini dengan mengalokasikan anggaran, sehingga pada waktunya betul-betul menunjukkan keberpihakan Indonesia terhadap masalah isu lingkungan,” kata Satya Yudha, Selasa (24/11/2015), di Jakarta.

Dalam acara yang diselenggarakan *The United Nations Office for REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation) Coordination in Indonesia (UNORCID)* atau kantor perwakilan PBB yang lebih berfokus kepada masalah lingkungan. Bekerjasama dengan DPR RI dalam hal ini Komisi IV dan Komisi VII, para tenaga ahli anggota dan komisi mendapatkan informasi terkini tentang masalah lingkungan.

Satya, menjelaskan bahwa dalam masalah lingkungan itu ada 2 aspek, yaitu pengelolaan hutan yang otomatis penerapan pada REDD+, dan mengelola buangan-buangan energi yang menimbulkan polusi.

Informasi yang berkembang di dunia saat ini, bagaimana negara menekan emisi karbonnya. seperti Indonesia ingin menekan emisi karbon sampai 26 persen. Tetapi, kata Satya, apabila

kita bisa mendapatkan bantuan asing, maka penekanan emisi karbonnya bisa hingga 41 persen pada tahun 2030.

Ini suatu hal yang sangat penting sehingga semua komponen dari *stakeholder* atau pemangku kepentingan termasuk di dalamnya DPR RI yang nanti meratifikasi beberapa perjanjian-perjanjian internasional dan mengenai hal-hal yang menyangkut lingkungan itu bisa sejalan.

“Sekarang dalam era demokrasi tentunya pemerintah tidak bisa jalan sendiri. Pemerintah juga harus bekerjasama dengan DPR agat nanti ketika ada ratifikasi internasional bisa dijalankan dengan baik,”katanya.

Indonesia akan menghadapi *Conference of the Parties (COP21)* yang akan diadakan di Paris, membahas mengenai apa yang telah disepakati di dunia terhadap Protokol Kyoto bisa dilaksanakan dengan baik di seluruh negara.

Satya berharap dalam COP21 yang nanti akan diselenggarakan tanggal 30 November sampai tanggal 11 Desember, itu bisa berjalan dengan sukses, dan bisa menjadi instrumen bagi setiap negara yang mengikutinya.

“Karena ada konsekuensi hukum apabila tidak melaksanakan. Itu yang sedang dibahas supaya di dalam COP21

nanti Indonesia bisa membawa misi itu dengan baik. Dan bisa mempengaruhi negara-negara pencemar lingkungan yang lain untuk sepakat mengurangi pengurangan emisi karbon itu,” ungkapnya.

Lebih lanjut Satya menerangkan, dilihat dari sisi hutan, yang faktor utama menyangkut perubahan fungsi lahan, adanya deforestasi, dan perubahan lahan hutan menjadi bukan hutan. Apabila itu tidak dikelola dengan baik, akan menimbulkan masalah seperti pence-

maran.

Di sisi energi, bahwa polusi udara yang paling besar yaitu berada pada transportasi darat yang otomatis tergantung pada bahan bakar yang dipakai. Bahan bakar di Indonesia masih belum mengikuti standar sampai Euro 4 yang bersih lingkungan.

“Kita masih menggunakan bensin yang mengandung timbal yang menimbulkan pencemaran. Itu yang menjadi faktor yang paling dominan, sehingga penggunaan energi bersih dikemudian

hari, konversi dari Bahan Bakar Minyak (BBM) ke Bahan Bakar Gas (BBG) tentunya berkontribusi terhadap pengurangan emisi karbon,” imbuhnya.

Disamping itu di bidang listrik, dia ingin mendorong Pemerintah menggunakan energi baru dan terbarukan, seperti *geothermal* atau panas bumi, karena kita kaya kandungan panas bumi bisa menjadi faktor yang mendorong pengurangan emisi karbon untuk pembangkit tenaga listrik. (AS) FOTO: NAE-FUROJI/PARLE/OD

DPR DUKUNG KEMITRAAN AIPA-ERIA



Suasana Dialogue Between Members of the ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) and the Members of Parliament of Japan

ASEAN dan Jepang telah memperluas dan memperdalam kerjasama di luar perdagangan ekonomi menjadi kerjasama yang mempromosikan perdamaian, stabilitas, pembangunan dan kemakmuran di kawasan Asia. Mempertimbangkan hal-hal di atas, DPR RI mendukung dan menyambut baik inisiatif kemitraan dan kerjasama AIPA-ERIA serta mendukung pelaksanaannya.

Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon dan Wakil Ketua Grup Kerjasama Bilateral (GKSB) DPR RI-Jepang Mohammad Suryo Alam dalam pertemuan yang bertajuk “Dialogue Between Members of the ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) and the Members of Parliament of Japan.” Acara tersebut dihelat di Gerbera Room, Hotel Mulia, Selasa (24/11).

Dalam pandangan Fadli Zon, di masa depan, DPR RI melihat

kebutuhan untuk memanfaatkan ERIA sebagai pemangku kepentingan bagi masyarakat ekonomi ASEAN dan untuk lebih mendukung pekerjaan parlemen. AIPA dan ERIA dapat bekerja dalam mengumpulkan praktik terbaik dari anggota AIPA dan untuk memberikan rekomendasi kebijakan dalam rangka mewujudkan integrasi ekonomi ASEAN dan pembangunan ekonomi yang adil. Lebih lanjut ditegaskan, “AIPA dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia siap untuk mendukung program-program kemitraan AIPA-ERIA.”

Sementara itu, Mohammad Suryo Alam mengatakan bahwa kerja sama ASEAN-Jepang akan berkembang jika Jepang melakukan kerjasama komprehensif di bidang-bidang seperti kerjasama ekonomi dengan ASEAN. “Sebagai seorang wakil dari parlemen anggota AIPA, saya sangat menyambut inisiatif untuk mengeksplorasi kemitraan antara ERIA dan AIPA,” katanya.

Dalam pidato penutupannya, Mohammad Suryo menekankan, inisiatif ini akan lebih mendukung pekerjaan AIPA, terutama di bidang Integrasi Ekonomi ASEAN.

Sebagai informasi, *The Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA)* adalah organisasi internasional yang didirikan di Jakarta pada tahun 2008 melalui perjanjian formal antara Pemimpin dari 16 negara di kawasan Asia Timur untuk melakukan kegiatan penelitian dan membuat rekomendasi kebijakan untuk integrasi ekonomi lebih lanjut di ASEAN dan Asia Timur.

ERIA bekerja sangat erat dengan Sekretariat ASEAN dan 16 Lembaga Penelitian untuk melakukan dan menyebarkan penelitian kebijakan di bawah tiga pilar, yaitu “Memperdalam Integrasi Ekonomi”, “Mempersempit Kesenjangan”, dan “Pembangunan Berkelanjutan” serta memberikan rekomendasi kebijakan analitis untuk Pemimpin dan menteri pada pertemuan regional mereka. (BKSAP,MPI)/FOTO:ANDRI/PARLE/IW.

DEUTCH BANK MANGKIR DARI PANGGILAN PANSUS PELINDO II

Anggota Pansus Angket Pelindo II DPR RI, Sukur Nababan menyalahkan pihak Deutsch Bank (DB) mangkir dari panggilan Pansus. Padahal kehadiran pihak DB itu sangat penting untuk menjelaskan ketidaksinkronan data dalam valuasi keuangan Pelindo II antara DB, *Finance Research Institute (FRI)* dan Bahana Sekuritas.

Deutsch Bank (DB) merupakan satu-satunya konsultan keuangan Pelindo II yang ditunjuk untuk melakukan valuasi keuangan Pelindo II dan Perpanjangan kontrak HPH (Hutchinson Port Holding). Sementara *Finance Research*



Anggota Pansus Angket Pelindo II DPR Sukur Nababan

Institute (FRI) dan Bahana Sekuritas ditunjuk bersama oleh Pansus untuk melakukan kajian analisis terhadap data DB.

“Yang melakukan valuasi (perhitungan) tidak ada di sini, tentu ini niat tidak baik, Kita (DPR-red) harus memanggil paksa untuk mempertanggungjawabkan apa yang divaluisikan, jangan terkesan main-main untuk melakukan kegiatan

perbisnisan di Indonesia. Kita harus memberikan *warning* kepada DB. Saya menduga di sini ada finansial *engineering*, kejahatan korporasi untuk menurunkan nilai dari JICT. Mungkin nanti bisa dijawab,” tegas Sukur dalam rapat Pansus Pelindo II di Senayan, Jakarta, Senin (23/11).

Dugaan Sukur itu terbukti lewat perhitungan yang dilakukan oleh Tim (FRI dan Bahana). Dalam grafik perhitungan ditemukan laba operasional yakni bila pendapatan bertambah maka laba pun bertambah.

“Namun yang dibuat oleh DB justru sebaliknya, pendapatan bertambah tetapi laba malah semakin turun,” ujar politisi dari fraksi PDI Perjuangan.

Kenapa harus dibuat turun? lanjut Sukur, tak lain karena untuk menghitung nilai perusahaan. Perhitungannya adalah laba operasional, jadi agar nilai (kontrak) perusahaan itu murah maka laba operasional diturunkan. Inilah yang dikatakan Sukur sebagai sebut kejahatan korporasi.

Untuk diketahui dalam melakukan perhitungan, Tim (Bahana dan FRI) berbasis pada data proyeksi asumsi yang digunakan DB, serta asumsi lain, seperti Asumsi biaya menggunakan basis data laporan histori tahun 1999 - 2013. (AYU/

FOTO: IWAN ARMANIAS/PARLE/IW.

PAPUA HARUS DIJADIKAN DAERAH PRODUKSI



Suasana FGD yang digelar BKSAP

Papua yang selama ini belum menjadi daerah produksi untuk berbagai komoditas, menyebabkan ongkos hidup dan biaya ekonomi sangat tinggi. Perlu ada upaya menjadikan Papua sebagai sentra produksi tertentu, sehingga bisa menurunkan biaya hidup.

Demikian disampaikan Ketua Pusat

Penelitian Politik, LIPI Adriana Elisabeth dalam *Focus Group Discussion* (FGD) yang digelar Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP), Senin (23/11). Selama ini tingkat kemiskinan di Papua tertinggi di Indonesia. Padahal, Papua sangat kaya dengan sumber daya alam. Selama belum menjadi daerah produksi,

biaya ekonomi di Papua masih tinggi. Ini menjadi kenyataan yang ironis.

“Sumber daya alam Papua sangat kaya. Tapi ekonomi Papua tetap tak kunjung membaik,” ujar Adriana. Pemerintah, sambung peneliti ini, sedang memperbaiki kondisi tersebut. Hal lainnya yang jadi sorotan adalah Papua masih selalu dipersepsikan sebagai daerah konflik. Ini berdampak pada pendekatan keamanan yang selalu dilakukan pemerintah di Jakarta dalam memperlakukan kawasan paling timur di Indonesia itu.

Jakarta harus merubah sudut pandangnya terhadap Papua. Jangan lagi ada stigma sebagai daerah konflik. Menurut Adriana, banyak PR yang harus segera diselesaikan di bumi Papua, terutama masalah sosial dan ekonomi. Kecemburuan sosial di Papua masih sangat tinggi. Orang Papua masih cemburu terhadap para pendatang yang ternyata lebih berdaya daripada penduduk asli Papua.

Sementara itu, pembicara lainnya Yuri Octavian Thamrin mengemukakan, pentingnya pemerintah Indonesia menoleh ke kawasan Asia Pasifik untuk membangun kerja sama kawasan yang saling menguntungkan. Indonesia

yang berada di kawasan Pasifik Selatan menghadapi banyak masalah kawasan. Di antaranya soal isu lingkungan dan perubahan iklim. Kawasan ini didominasi oleh Australia dan Selandia Baru.

Menurut Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, Kemenlu ini, urgensi membangun kerja sama kawasan, lantaran di Indonesia ada sekitar 15 juta jiwa etnis Malanesia. Kedekatan etnik seperti ini, bisa memudahkan membangun kerja sama yang saling menghar-

gai dan menguntungkan. Di era Gus Dur sebagai Presiden, kawasan Pasifik sempat dilirik. Ada 14 negara di kawasan Pasifik Selatan. Kerja sama investasi tentu yang paling mungkin dilakukan.

Exxon Mobil, sambung Yuri, telah berinvestasi di sektor tambang Papua Nugini sebesar USD 1,6 miliar. Tiongkok juga menaruh saham mayoritas di tambang emas Fiji, salah satu negara di kawasan Pasifik. Selain dua pembicara di atas, hadir pula Yorrys Raweyai Ang-

gota DPR dari Papua sebagai pembicara. Acara diskusi sendiri dimoderatori oleh Anggota DPR Robert Kardinal.

Diskusi FGD ini bertajuk “Otsus Aceh, Papua, dan Keistimewaan DI Yogyakarta”. Tema ini menyoal tiga keistimewaan di tiga daerah. Ada banyak persoalan yang harus dipetakan kembali oleh pemerintah untuk menangani masalah dengan kekhasannya sendiri. (MH), FOTO : NAEFURODJI/PARLE/HR.

MKD MINTA PENDAPAT PAKAR BAHASA HUKUM

Rapat pleno Mahkamah Kehormatan Dewan-MKD DPR RI memutuskan untuk meminta pendapat pakar bahasa hukum terkait perpindahan pandangan terhadap tentang Tata Beracara. Salah satu permasalahan yang menjadi perdebatan adalah apakah pejabat eksekutif dapat mengadukan ketua lembaga eksekutif kepada MKD.

“Setelah melihat dokumen, Pak SS (Sudirman Said) menyampaikan pengaduan sebagai menteri bukan sebagai pribadi. Ini perlu didudukkan apakah pejabat eksekutif dapat mengadukan ketua lembaga legislatif. Jadi ada masalah dari sisi ketatanegaraan dan sisi bahasa hukum. Nah daripada ngotot-ngototan lebih baik kita undang pakar bahasa hukum,” kata Ketua MKD Surahman Hidayat kepada wartawan usai rapat di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (23/11/15).

Aturan Tata Beracara MKD pada Bab IV pasal 5 ayat 1 terdapat penjelasan; Laporan dapat disampaikan oleh a. Pimpinan DPR atas aduan Anggota terhadap Anggota; b. Anggota ter-

hadap Pimpinan DPR atau Pimpinan AKD; dan/atau c. masyarakat secara perseorangan atau kelompok terhadap Anggota, Pimpinan DPR, atau Pimpinan AKD.

Rapat Pleno MKD berpeda pandangan soal kata ‘dapat’, apakah Sudirman Said bisa disebut pelapor, karena laporan dibuat sebagai Menteri ESDM lengkap dengan kop surat resmi kementerian, bukan sebagai warga masyarakat. Sementara di dalam aturan tersebut tidak ada klausul tentang pejabat eksekutif atau menteri.

Rapat memutuskan untuk meminta sekretariat memanggil pakar bahasa hukum dari Kementerian Hukum dan HAM, sebelum akhirnya pleno MKD sampai pada kesimpulan pengaduan dapat ditindaklanjuti. Rapat Dengar Pendapat Umum dengan pakar ini dijadwalkan akan berlangsung besok.

Kepada wartawan politisi dari Fraksi PKS ini juga menjelaskan ada kejanggalan dalam laporan yang disampaikan Menteri ESDM. Dalam pernyataannya kepada MKD, ada rekaman pemi-



Ketua MKD Surahman Hidayat

caran yang diduga sebagai SN dengan durasi mencapai 120 menit.

“Sementara rekaman pembicaraan yang kita terima dalam *flasdisk* hanya berdurasi 11.38 detik. Jadi kita menyimpulkan materi yang diserahkan masih kurang, harapannya ini bisa segera dilengkapi,” demikian Surahman. (IKY),

FOTO : JAKA NUGRAHA/PARLE/HR.

Pansus Pelindo II Akan Panggil Menhub

Pansus Angket Pelindo II yang mengagendakan rapat dengan mantan Menhub E.E. Mangindaan pada Senin (23/11), akhirnya ditunda pada tanggal 2 atau 3 Desember mendatang. Meski Mangindaan yang kini juga anggota DPR dari Fraksi PD sudah hadir di ruang rapat Pansus, namun akhirnya sepakat untuk ditunda dan dipanggil bersama Menhub periode sekarang Ignasius Jonan.

Kepada pers usai memimpin rapat tersebut, Rieke menyatakan, alasan memanggil mantan Menhub dan Menhub Jonan karena ada kesinambungan



Mantan Menhub E.E. Mangindaan

cara pandang terhadap substansi hukum perpanjangan konsesi JICT. Perpanjangan kontrak harus sesuai dengan ketentuan hukum termasuk UU Pelayaran telah disampaikan kepada Direksi Pelindo I, II, III dan IV.

“Saya kira ini sangat penting bagaimana Kemenhub merasa keberatan dari sisi hukum dari perpanjangan kontrak pengelolaan pelabuhan tersebut. “Saya belum bisa menjelaskan lebih detail, nanti saja ditunggu saat Pansus mengundang Menhub Jonan,” kilahnya.

Kepada Rieke, mantan Menhub Mangindaan juga menjelaskan, per-

soalan yang terjadi di Pelindo II harus difokuskan pada perpanjangan kontrak dengan Hutchison Port Holding. Yang harusnya selesai 2019 tapi dipercepat, “Beliau memiliki insting politik dan analisis hukum yang penting dikemu-

kakan kenapa ada keberatan,” tegasnya.

Lebih lanjut politisi PDI Perjuangan ini menyatakan, pihaknya tidak bisa menyampaikan penjelasan karena belum dibicarakan secara resmi. Ia meminta pers pada tanggal 2 atau 3

Desember, setelah kedua mantan dan pejabat Kemenhub itu memenuhi undangan Pansus Pelindo DPR. (MPI), FOTO : JAKA NUGRAHA/PARLE/HR.

Panja RUU Penjaminan Jaring Masukan di Yogya

Panitia Kerja RUU tentang Penjaminan Badan Legislatif DPR RI dalam rangka menjaring masukan bagi RUU Penjaminan melakukan pertemuan dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Jamkrindo, Perbankan, Kadin, Asosiasi, dan Pelaku Usaha (UMKM) Yogyakarta.

“Diharapkan sebelum pembahasan resmi di DPR bersama dengan pemerintah, dalam pertemuan ini Dewan mendapatkan banyak masukan. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan menerima banyak masukan sesuai dengan kepentingan masing-masing. Tidak perlu sama, karena Bank punya kepentingan yang berbeda dengan lembaga penjaminan, demikian juga dengan pelaku usaha memiliki kepentingan yang berbeda, itu hal yang biasa,” kata Ketua Tim Panja yang juga Wakil Ketua Baleg Totok Daryanto di Yogyakarta, Jumat (20/11/2015).

Dijelaskan Totok, RUU Penjaminan saat ini memasuki Pembicaraan Tingkat I yang pembahasannya akan dilakukan antara Baleg DPR dan Pemerintah. Maksud dari pertemuan ini untuk menyerap aspirasi agar diperoleh masukan yang konstruktif dari segenap unsur masyarakat, khususnya para *stakeholders* di industri penjaminan, demi penyempurnaan RUU tentang Penjaminan.

“Tugas kami di DPR adalah merajut berbagai kepentingan yang disampaikan didalam sistem perundangan agar menjadi adil. Jadi seluruh kepentingan itu diakomodir didalam sebuah Undang-Undang,” terang politisi dari Partai Amanat Nasional ini.

Menurutnya, lembaga penjaminan di Indonesia sebenarnya sudah berjalan, walaupun payung hukumnya belum ada, masih *dompleng* pada Undang-Undang lain. “Kami melihat banyak negara telah memanfaatkan instrumen penjaminan untuk mendorong perekonomiannya dan mereka cukup berhasil karena lembaga penjaminan itu memiliki posisi yang strategis dan juga memiliki payung hukum yang jelas,” jelas Totok.

Karena itulah, tambahnya, DPR selalu ingin mencari solusi bagi persoalan yang ada di masyarakat. Kalau kalangan usaha UKM itu biasanya keluhannya adalah masalah permodalan



Ketua Tim Panja RUU Penjaminan Totok Daryanto saat pertemuan dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi DIY

dan selalu saja mengatakan bahwa usahanya memiliki *visibilitas* yang bagus, tapi kalau datang ke bank selalu saja ditolak karena rupanya bank itu tidak hanya melihat dari *visibilitas* usahanya itu tapi terutama juga dilihat dari keamanannya, agunannya, dan lain sebagainya.

“Dengan adanya lembaga penjaminan ini salah satunya adalah hal-hal yang seperti itu ada solusinya. Kalau UMKM ingin mengembangkan usahanya kekurangan permodalan, mungkin aset atau modalnya tidak cukup. Maka untuk menambah permodalan tersebut, sekarang ada pintunya untuk mencari permodalan itu melalui penjaminan ini,” papar anggota Komisi VII DPR RI ini.

Anggota Panja RUU Penjaminan Baleg DPR RI yang hadir dalam pertemuan tersebut, antara lain My Esti Wijayanti dan Abidin Fikri (F-PDIP), Ahmad Zacky Siradj (F-PG), Yanuar Prihatin (F-PKB), dan Syarif Abdullah Alkadrie (F-Nasdem).

Dalam pertemuan tersebut selain dihadiri *stakeholder* di industri penjaminan, hadir pula Asisten Perekonomian dan Pembangunan DI Yogyakarta Didik Purwadi dan Direktur Penjaminan Non Bank Jamkrindo Nanang Waskito. (SC), FOTO : SUCIATI/PARLE/HR.

DEPUTI PERSIDANGAN GELAR RAKOR SAMBUT DELEGASI JEPANG

Segenap pejabat di jajaran Deputi Bidang Persidangan, Sekretariat Jenderal DPR RI menggelar rapat koordinasi dengan staf Duta Besar Jepang untuk Indonesia, terkait kunjungan delegasi Jepang ke Indonesia. Rakor berlangsung di Gedung

Sekretariat Jenderal DPR RI, Senin (23/11/15).

Lebih dari 260 Delegasi Jepang yang dipimpin oleh *Former Minister of Economy, Trade, and Industry and Chairman Council of Liberal Democratif Party of Japan*, Mr. Toshihiro



Deputi Persidangan Setjen DPR Damayanti menggelar rapat koordinasi dengan staf Duta Besar Jepang untuk Indonesia

Nakai, akan mengunjungi DPR pada Selasa (24/11/15) esok. Sejumlah persiapan menjadi perbincangan dalam rakor.

Deputi Bidang Persidangan, Damayanti, menyatakan, Delegasi akan diterima langsung oleh Ketua DPR Setya Novanto, dengan didampingi Pimpinan DPR, Pimpinan AKD DPR, serta GKSB Indonesia – Jepang. Turut serta Duta Besar dari kedua negara.

Maya, panggilan akrab Damayanti menambahkan, Delegasi terbagi menjadi dua kloter, yakni delegasi A yang berjumlah 22 orang, dan Delegasi B sebanyak 240 orang. Pertemuan sendiri, juga akan dibagi menjadi dua tempat, yakni di Gedung Nusantara dan Gedung Nusantara III.

“Semoga lancar persiapan acara, dan acara besok juga lancar,” harap Maya, sembari menutup rapat. Hadir juga dalam rakor ini, Kepala Biro Humas dan Pemberitaan, Djaka Dwi Winarko, dengan didampingi oleh Kabag Pemberitaan, Irfan.

(SF), FOTO : DENUS/PARLE/HR.

PEMERINTAH TIONGKOK DUKUNG PENUH MAJUKAN UMKM

Delegasi BKSAP DPR saat berkunjung ke CCPIT/KADIN Tiongkok, memperoleh penjelasan bahwa di Tiongkok jumlah UMKM sangat banyak karena pemerintah memang memberikan dukungan penuh untuk memajukan UMKM. Namun demikian, UMKM di Tiongkok sampai saat ini masih memerlukan bantuan keuangan/modal dan kebijakan pemerintah.

Ketua Delegasi BKSAP Nurhayati Ali Assegaf di sela-sela kunjungannya ke Tiongkok baru-baru ini menyatakan, namun demikian CCPIT itu mengakui bahwa pemerintah Tiongkok telah memberikan sejumlah kebijakan untuk memajukan UMKM, antara lain pelayanan izin usaha yang cepat sekitar satu hari, peringanan persyaratan pendirian kelompok usaha, dan pengurangan pajak sampai skala tertentu. Di sisi lain perusahaan-perusahaan besar kurang memberikan perhatian terhadap tumbuh kembangnya UMKM.

Saat dimintai pandangan CCPIT terkait pemberlakuan MEA, CCPIT menyampaikan bahwa kesepakatan perdagangan bebas regional pada dasarnya positif bagi dunia usaha terutama memanfaatkan mekanisme pasar regional. Disampaikan pula bahwa CCPIT masih menempatkan Singapura sebagai rekan strategis bisnis di kawasan. CCPIT beralasan bahwa Singapura mampu menyediakan mekanisme pembiayaan yang lebih memadai. Dalam konteks ini, Ketua BKSAP berpandangan bahwa perlu digali lebih jauh sejauhmana kesiapan lembaga-lembaga perbankan Indonesia dalam menghadapi MEA.

Pada sesi dialog dengan Huawei, Ketua BKSAP Nurhayati meminta penjelasan terkait peran Huawei dalam mendukung perkembangan UMKM di Indonesia terutama lantaran UMKM diharapkan menjadi salah satu tulang punggung perekonomian Indonesia menjelang pemberlakuan MEA.

Terkait permintaan tersebut, Zhao Shugang, Country



Ketua Delegasi BKSAP Nurhayati Ali Assegaf saat melakukan kunjungan ke CCPIT/KADIN di Tiongkok

Director Huawei Indonesia, mengatakan bahwa pihaknya berupaya terus berkontribusi untuk pembangunan Indonesia. “Kami punya program *Seeds for the Future* dengan memberikan pelatihan terhadap hampir 20.000 bekerjasama dengan enam universitas terkemuka di Indonesia. Setiap tahun kami juga bekerjasama dengan KOMINFO untuk menggelar forum-forum dalam kerangka penguatan pembangunan industri ICT di Indonesia,” papar Shugang.

Lebih lanjut, Shugang mengusulkan agar UMKM dapat memanfaatkan teknologi internet dalam strategi pemasaran produknya. “Mungkin di sini mengetahui bagaimana di China saat ini dalam satu hari sekitar 14 juta dolar uang dibelanjakan melalui internet,” ungkap dia.

Kendati demikian, Nurhayati meminta Huawei dapat secara langsung berkontribusi dalam memajukan UMKM di Indonesia. “Ke depan, kami ingin membuat seminar dengan melibatkan perusahaan-perusahaan multinasional untuk berkontribusi dalam memajukan UMKM dalam menghadapi MEA. Kami mengharapkan Huawei dapat berpartisipasi dalam seminar itu. Kami ingin masyarakat Indonesia dan perusahaan-perusahaan itu sama-sama mendapat keuntungan” kata politisi yang juga anggota Komisi satu itu.

Dalam pertemuan tersebut Huawei menjelaskan bahwa sejak dua belas tahun lalu berdiri di Indonesia, Huawei In-

donesia saat ini memperkerjakan lebih dari 2.500 orang dengan komposisi 80% dari Indonesia. Huawei Indonesia pada tahun lalu membukukan keuntungan USD 400 juta dengan kontribusi pajak USD 35 juta setiap tahun. Perusahaan mul-

tinasional asal China itu menyampaikan upaya-upaya untuk menjadikan Huawei sebagai perusahaan terdepan dalam menyediakan infrastruktur ICT. (BKSAP,MP), FOTO : DOK.BKSAP/PARLE/HR.

GATOT SUDJITO: TRANSPARANSI, HASIL PALING SIGNIFIKAN REFORMASI 1998



Anggota DPR Gatot Sudjito pada acara Parlemen Kampus di Untirta Serang, Banten

Selama masa orde baru, DPR masih cenderung menjadi tangan kekuasaan, tidak maksimal dalam menjalankan fungsi pengawasannya, mengontrol kekuasaan. Baru setelah memasuki reformasi 1998, telah membawa perubahan bagi parlemen di Indonesia. Berbagai aturan telah membuat dan memosisikan DPR menjadi Lembaga Parlemen yang modern. MPR yang sebelumnya menjadi Lembaga Tertinggi Negara, kini posisinya sejajar dengan DPR sebagai Lembaga Tinggi Negara.

Demikian dikemukakan anggota DPR Gatot Sudjito pada acara Parlemen Kampus di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta), Serang, Banten (Jumat (20/11)).

Menurutnya, memasuki era reformasi yang ditandai dengan keterbukaan informasi, merupakan sebuah era baru bagi bangsa ini untuk menapaki jejak kemajuan berdemokrasi. Transparansi menjadi salah satu syarat utama yang harus hadir dalam seluruh sistem kita.

“Transparansi diperlukan agar kekuasaan lembaga negara dapat dikontrol oleh masyarakat umum sebagai “pemegang” kedaulatan. Untuk menopang ini, kita telah membentuk UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

(KIP) agar semua lembaga negara, termasuk DPR menyediakan ruang keterbukaan informasi,” jelas anggota Komisi II DPR ini.

Sebagai tindak lanjut, kata anggota Komisi II DPR ini, berbagai regulasi telah dibentuk agar terjadi transparansi di semua lini. Hal ini sebagai sarana untuk membuka kran kebebasan ruang publik, sehingga terjadi proses *check and balances*. Keterbukaan dan transparansi ini adalah hasil yang paling signifikan dalam reformasi 1998 yang telah didorong dan diwujudkan dengan tetesan perjuangan seluruh rakyat, khususnya mahasiswa.

Ditambahkan politisi FPG ini, transparansi tidak hanya membuka ruang kontrol masyarakat sipil dan swasta seperti mahasiswa serta *civil society*, tetapi juga akan memudahkan antar lembaga negara (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) untuk saling kontrol satu sama lain. Transparansi akan mendorong terjadinya keseimbangan sehingga terbangun kerjasama yang utuh dan integral antar seluruh elemen negara.

Ditengah berbagai macam perubahan tersebut, maka kehadiran parlemen modern menjadi tuntutan zaman yang tidak dapat dihindari. Ada beberapa alasan mengapa parlemen modern menjadi tuntutan. Revolusi bidang teknologi informasi membentuk masyarakat semakin terbuka. Revolusi informasi yang sebelumnya tertutup, kini sudah terbuka. Revolusi informasi ini berdampak ke ruang politik sehingga sistem pemerintahan yang tertutup atau otoriter, tidak digemari. “Inilah alasan mengapa juga terjadi reformasi 1998,” ungkap Gatot.

Adapun ciri dan bentuk parlemen modern adalah partisipasi publik dan keterbukaan informasi. Seluruh rakyat bebas untuk mengakses informasi dan menyampailan pendapatnya. Membuka partisipasi dan akses informasi publik dengan mengadakan pusat pemberitaan parlemen yang memberitakan seluruh aktifitas parlemen dalam menjalankan fungsinya.

Selain itu, adanya televisi parlemen, museum dan perpustakaan yang berbasis *online* menjadi ciri kuat parlemen modern yang ditopang dengan penguatan peran parlemen melalui pemanfaatan teknologi informasi. (SPY,MP), FOTO : SUPRIYANTO/PARLE/HR.

SEKJEN DPR BUKA ACARA PARLEMEN KAMPUS DI UNTIRTA

Kegiatan Parlemen Kampus yang diselenggarakan Fisip Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Banten ini merupakan sarana pendidikan politik bagi generasi muda. Tidak saja meng-

etahui, tetapi juga memahami dan merasakan bagaimana sesungguhnya kerja DPR dalam memperjuangkan aspirasi rakyat.

Demikian dikatakan Sekjen DPR

Winantuningtiyastiti saat memberi sambutan sekaligus membuka acara Parlemen Kampus di Gedung Paripurna DPRD Serang, Banten Jum'at (20/11)

Kegiatan Parlemen Kampus yang diselenggarakan Fisip Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Banten ini merupakan sarana pendidikan politik bagi generasi muda. Tidak saja mengetahui, tetapi juga memahami dan merasakan bagaimana sesungguhnya kerja DPR dalam memperjuangkan aspirasi rakyat.

Demikian dikatakan Sekjen DPR Winantuningtyastiti saat memberi sambutan sekaligus membuka acara Parlemen Kampus di Gedung Paripurna DPRD Serang, Banten Jum'at (20/11) siang.

Menurut Win, sapaan akrab Sekjen DPR, melalui kegiatan seperti ini maka generasi muda tidak hanya mengedepankan sikap kritisnya tetapi juga memberikan solusi bagi kemajuan proses demokrasi di negara tercinta ini. Pasalnya mereka diajak ikut terlibat dalam proses perumusan dan pengambilan kebijakan di DPR.

Apalagi lanjut Win, forum semacam ini juga merupakan amanat dari organisasi Parlemen Dunia (Inter Parliamentary Union-IPU) dalam rangka memperingati Hari Demokrasi Internasional (Democracy Day) setiap tanggal 15 September. Semua anggota IPU yang



Sekjen DPR Winantuningtyastiti

berjumlah sekitar 164 negara, diminta untuk mengajak generasi mudanya berpartisipasi dalam proses demokrasi.

Ditambahkan Win, proses kesinambungan kepemimpinan nasional di masa depan bisa dicapai melalui kegiatan parlemen kampus bagi para mahasiswa di wilayah Banten dengan merasakan menjadi anggota DPR yang mewakili rakyat. Peran itu tidak mudah dijalankan mengingat bagaimana proses pemilu yang berlangsung yang

mewakili satu daerah pemilihan dan harus menjadi anggota partai politik tertentu.

Proses selanjutnya adalah bagaimana memerankan wakil rakyat yang benar-benar akuntabel dan mampu menjalankan semua fungsi DPR dengan sebaik-baiknya. "Hal itu menjadi sulit mengingat setiap wakil rakyat juga menjadi anggota parpol, sehingga diperlukan titik temu atas segala perbedaan yang muncul di setiap pembahasan suatu masalah baik di bidang legislasi anggaran maupun pengawasan," ungkap dia.

Menjadikan DPR sebagai rumah rakyat dan semua anggotanya mampu menjadi penyalur aspirasi rakyat haruslah didukung oleh sebuah sistem yang baik termasuk didalamnya mengatur tentang mekanisme kerjanya. Salah satunya faktor penting berjalannya sebuah parlemen adalah bagaimana menyusun peraturan tata tertib yang ada mampu mengatur tentang seluk beluk keparlemenan baik terkait dengan mekanisme kerja maupun keberadaan berbagai alat kelengkapan dewan dalam menunjang berlangsungnya 3 fungsi utama yang dimiliki. (SPY,MP), FOTO : SUPRI-YANTO/PARLE/HR.

SIMULASI PARLEMEN KAMPUS BERIKAN PENCERAHAN GENERASI MUDA



Suasana simulasi Parlemen Kampus di Untirta

Sekretaris Jenderal DPR-RI Winantuningtyastiti membuka acara Parlemen Kampus di Gedung DPRD Propinsi Banten Jum'at (20/11) siang. Acara kali ini bertema "Dinamika Revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dalam Pemilihan Serentak".

Kegiatan Parlemen Kampus tahun 2015 ini diselenggarakan Fisip Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten, diikuti

sebanyak 12 perguruan tinggi se Banten.

Pada acara ini Sekjen DPR Win, panggilan akrabnya menyatakan, dirinya percaya seluruh peserta akan mampu menjalankan peran menjadi anggota DPR tersebut dan bahkan akan jauh lebih baik dari pada anggota DPR yang sebenarnya.

Menurut Win, menjadi anggota DPR yang baik, tidak sekedar mengandalkan kemampuan intelektual semata. Tetapi juga harus mampu menjadi panutan bagi rakyat yang diwakilinya melalui sikap santun, namun tegas serta senantiasa berupaya memperjuangkan aspirasi rakyatnya sebaik mungkin melalui cara-cara yang baik pula.

Dengan kegiatan tersebut ia berharap, simulasi rapat dapat memberikan pengetahuan, pemahaman, sekaligus pencerahan bagi generasi muda dalam rangka ikut serta membangun demokrasi di Indonesia terutama proses pembahasan sebuah RUU di DPR.

Sementara Staf Ahli Gubernur Banten bidang pemerintahan, Sigit Suwanto dalam sambutannya mengatakan, kegiatan ini merupakan salah satu bentuk kontribusi civitas akademika Untirta untuk memberikan sumbangsih pemikiran terhadap kepentingan masyarakat, khususnya mengenai pemilihan kepala daerah. Sekaligus sebagai wahana bagi sosialisasi penyelenggaraan pemilihan kepala daerah

kepada masyarakat.

Sigit mengemukakan, kesempatan ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin sehingga mampu memberikan masukan yang konstruktif bagi penyelenggaraan kegiatan Pemilihan kepala Daerah yang berkualitas.

“Hal seperti ini harus menjadi kesadaran bagi semua pihak, bahwa penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah merupakan momentum yang tepat untuk memberikan kon-

tribusi dalam proses penyelenggaraan negara,” tegas dia.

Oleh karena itu lanjut Sigit, peran serta semua pihak serta kesamaan pemahaman terhadap regulasi yang ada merupakan sebuah keniscayaan agar pemilihan Kepala Daerah dapat berjalan sesuai harapan, serta melahirkan pemimpin yang berkualitas, partisipatif, penyelenggaraan yang tertib, serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. (SPY,MP),

FOTO : SUPRIYANTO/PARLE/HR.

PERMASALAHAN PAJAK JADI KENDALA INVESTASI DI INDONESIA

Permasalahan seputar pajak yang dialami Usaha Kecil dan Menengah Domestik, membuat UKM tidak dapat berkembang. Bahkan, investor asing pun mengeluhkan soal pajak. Untuk mengatasi tantangan tersebut, pemerintah saat ini sedang menyusun regulasi mengenai upaya pengembangan UKM, termasuk bagaimana UKM dapat menghadapi kendala perpajakan.

“Bukan hanya investor asing, tetapi praktisi UKM domestik juga mengeluhkan soal pajak,” kata Anggota BKSAP DPR RI Melani Leimena Suharli, saat pertemuan antara Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR dengan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Thailand, di Bangkok, Thailand, Kamis (19/11/15). Kunjungan BKSAP ini juga dalam rangka untuk menindaklanjuti resolusi AIPA dalam rangka MEA.

Melani menambahkan, permasalahan iklan dan perizinan juga menjadi kendala bagi pengusaha Thailand. Pasalnya, setiap pemasangan iklan masih dikenakan pajak. Selain itu, dibutuhkan waktu yang sangat lama, hampir satu tahun untuk mendapatkan sertifikat dari BPOM. Persoalan yang sama juga dihadapi oleh pengusaha lokal.

“Hal ini menjadi PR (pekerjaan rumah, RED) bagi DPR dalam menyusun kebijakan,” kata politisi F-Demokrat itu, sembari mempertanyakan mengenai insentif yang diberikan Pemerintah Thailand kepada sektor UKM di Thailand.

Dalam kesempatan yang sama, ia juga menyampaikan kekhawatiran mengenai produk Indonesia yang sebelumnya diekspor, namun diimpor kembali ke dalam negeri setelah diberi label asing.

“Hal itulah yang harus kami hindari, sehingga inspeksi terhadap produk impor perlu dilakukan. Terlebih lagi, kita akan menghadapi MEA, segala sesuatunya harus lebih transparan,” imbuh politisi asal dapil Jakarta itu.

Pemerintah Thailand Gelontorkan Triliunan Rupiah Promosi AEC

Masih dalam kesempatan yang sama, delegasi BKSAP DPR-RI mengadakan pertemuan dengan Departemen Negosiasi Perdagangan Kerajaan Thailand. Dalam pertemuan tersebut, Melani menekankan pentingnya pengembangan sektor UKM dalam menghadapi MEA.

Salah satu Direktur Kementerian Negosiasi Perdagangan Thailand Vitat Vajropala menuturkan bahwa konsep *One Tambon One Product* (OTOP) di Thailand diadopsi dari Jepang. Tantangan yang biasa dihadapi oleh Thailand adalah ketika produsen UKM ingin memproduksi beragam jenis produk, tetapi mereka tidak bisa memasarkannya. Hanya se-



Kunjungan Delegasi ke AEC Information Center, Kementerian Perdagangan Thailand

dikit diantara mereka yang berhasil menjual produknya di luar negeri.

“Sektor UKM harus memahami mekanisme perdagangan yang diimplementasikan melalui MEA. Apabila mereka tidak memahami hal ini, maka mereka tidak akan bisa mengeksport produk ke luar negeri dan akhirnya tidak akan mampu berkompetisi,” kata Direktur AEC Information Center Thipasuk.

Di Thailand, AEC Information Center didirikan sebagai salah satu bentuk dukungan terhadap sektor UKM. Lembaga tersebut melayani sekitar 40 ribu UKM dan menyediakan layanan informasi selama 24 jam. Sektor UKM dapat memperoleh informasi mengenai perjanjian perdagangan bebas, kesempatan dan tantangan bagi UKM, seminar dan pelatihan, serta informasi terkini mengenai situasi perekonomian. Ada sekitar 1,5 juta warga Thailand yang mencari informasi MEA melalui pusat informasi AEC.

Departemen Negosiasi Perdagangan Thailand menggunakan teknologi terbaru untuk mendistribusikan informasi, termasuk membuat aplikasi *smartphone* dan *tablet*, mempublikasikan buku dan jurnal, serta meluncurkan sistem perpustakaan *online* untuk mempermudah akses warga terhadap informasi.

Pada 2015, Biro Peningkatan Kapasitas Perdagangan memperoleh kucuran dana untuk mempromosikan AEC sebesar 43 juta Baht atau sekitar Rp 17,2 miliar. Ada lebih dari 30 lembaga di Thailand yang berkaitan dengan promosi AEC. Vitat Vajropala memperkirakan bahwa jumlah total anggaran yang dikucurkan pemerintah Thailand untuk mempromosikan AEC mencapai sekitar 20 miliar Baht atau sekitar Rp 8 triliun.

(SF)/FOTO:DOC.BKSAP/PARLE/IW.

DELEGASI BKSAP DPR KUNJUNGI TIONGKOK

Dalam kerangka menindaklanjuti resolusi-resolusi ASEAN *Inter-Parliamentary Assembly* (AIPA) terkait peran parlemen regional atas pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), Delegasi Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI melakukan kunjungan dua hari (18-19/11/2015) ke Tiongkok.

Delegasi dipimpin Dr. Nurhayati Ali Assegaf (Ketua BKSAP DPR RI) dengan anggota Mahfudz Abdurrahman (F-PKS), Sudin (F-PDIP), Betti Shadiq Pasadigoe (F-PG), dan Sumail Abdillah (F-Gerindra).

Delegasi telah melakukan rangkaian dialog dengan pelbagai lembaga pemerintah dan swasta yaitu ke Parlemen Tiongkok (the National People's Congress/NPC), Badan Negara untuk Pers, Publikasi, Radio, Film dan Televisi Tiongkok (SAPPRFT), KADIN Tiongkok (the China Council for the Promotion of International Trade/CCPIT), dan perusahaan ICT Huawei.

Menurut Nurhayati, kunjungan ini dimaksudkan untuk menggali dan mengobservasi keberhasilan Tiongkok dalam mengembangkan industri kreatif khususnya UMKM sehingga dapat bersaing pada level global di tengah-tengah pemberlakuan kesepakatan regional perdagangan bebas.

Selain itu, politisi Fraksi Partai Demokrat itu menegaskan bahwa Indonesia-Tiongkok memiliki hubungan sangat panjang dan sangat baik. Oleh sebab itu, parlemen juga memberikan dukungan penguatan dan pengembangan hubungan antar-pemerintah kedua negara.

Terkait peran NPC untuk pembangunan industri kreatif, ada tiga hal yang dilakukan yaitu menyediakan perangkat hukum, pengawasan secara khusus atas industri kreatif dan kepastian hukum dengan pemberlakuan hukum secara sungguh-sungguh guna menjamin perkembangan industri kreatif.

NPC memaparkan beberapa perangkat hukum produk NPC untuk memajukan industri kreatif antara lain, pertama, Undang-undang Kemajuan Teknologi tahun 1993 yang isinya mendorong inovasi dan teknologi di semua level masyarakat dan mendorong riset di bidang masing-masing.

Selain itu, Undang-undang Transfer Hasil Teknologi tahun 1996 yang isinya mendorong hasil inovasi dilempar ke pasar dan perusahaan diwajibkan melaksanakan hasil inovasi tersebut serta pemerintah memberikan insentif memadai bagi para peneliti. Selanjutnya, undang-undang Hak Cipta tahun 1984. Selain itu, pihak NPC menambahkan bahwa strategi memajukan industri kreatif melalui tiga hal yaitu dengan perbaikan lingkungan, perbaikan birokrasi dan perbaikan hukum.



Delegasi Parlemen Indonesia dipimpin Ketua BKSAP DPR Nurhayati Ali Assegaf saat pertemuan di Tiongkok

Terkait peran NPC dalam memajukan UMKM, disampaikan tiga langkah penting yaitu, pertama, pengawasan terkait pelaksanaan hukum, pembangunan yang berkelanjutan, dan laporan dan penelitian yang hasilnya akan dijadikan topik utama tahunan NPC.

Saat berkunjung ke SAPPRFT dijelaskan bahwa SAPPRFT merupakan badan pemerintah yang bertugas mengawasi dan mengatur semua kegiatan yang

berkaitan dengan pers, publikasi, radio, film dan televisi. Kendati pun demikian, pejabat SAPPRFT itu menekankan bahwa pihaknya juga bertanggungjawab atas pembangunan dan inovasi kebudayaan, yaitu kebudayaan yang selaras dengan kebudayaan nasional masing-masing.

Lebih jauh SAPPRFT menyampaikan bahwa produksi film Tiongkok dimulai tahun 1895. Sejak era keterbukaan pada sekitar tahun 1978, perusahaan-perusahaan swasta yang memproduksi film bermunculan. Saat ini ada sekitar 7000-an perusahaan swasta. Sejak era keterbukaan, pembuatan film tidak perlu lagi izin pemerintah. SAPPRFT hanya melihat dan mengawasi kontennya saja.

Saat ini, sambung SAPPRFT, setiap tahunnya di Tiongkok tercatat produksi sekitar 600 film dengan keuntungan yang diperoleh pada tahun 2014 lalu antara lima sampai tujuh juta dolar. SAPPRFT juga menyebutkan bahwa sekitar 5% dari keuntungan film akan dialokasikan untuk memajukan produksi film-film berikutnya.

Lebih jauh SAPPRFT mengatakan bahwa Pemerintah Tiongkok sangat konsen membuat undang-undang terkait pengembangan industri film. Tiongkok juga secara regular mengirim sineas-sineas berbakatnya ke luar negeri untuk mendalami industri film. SAPPRFT juga mengundang dari sejumlah negara untuk dapat hadir dalam pelatihan singkat kami selama dua pekan terkait industri perfilman. Terkait hal ini, Ketua Delegasi Nurhayati meminta agar Tiongkok dapat mengundang pihak-pihak di Indonesia untuk mengikuti pelatihan-pelatihan tersebut.

Hal menarik lain disebutkan adalah kebijakan Tiongkok agar film dan program televisi menjadi tuan rumah di negerinya sendiri. Dalam kaitan ini, Tiongkok membatasi film impor yang memasuki Tiongkok dengan tidak boleh lebih dari 25% dari total film yang beredar dan maksimal 15% dari total waktu tayang film-film yang tengah diputar. SAPPRFT juga menggarisbawahi bahwa peningkatan kualitas film domestik dapat juga mengurangi minat penonton terhadap film-film impor. (BKSAP,MP), FOTO : DOK.BKSAP/PARLE/HR.



Rapat Dengar Pendapat Pansus RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol (MINOL) dengan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Krishna Murti dipimpin Ketua Pansus Arwani Thomafi, Kamis (26/11)
Foto: Iwan Armanias/Parle/OD



Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Satya Widya Yudha Sebagai Pembicara Dalam Acara The United Nations Office for REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation) Coordination in Indonesia (UNORCID), Selasa (24/11/2015)
Foto : Naefuroji/Parle/OD



Anggota Komisi I DPR RI Bachtiar Aly Pada Sarasehan Nasional Komite Nasional untuk Solidaritas Rohingya (KNSR) dengan tema 'Tuntas menolong Rohingya Menyongsong Hasil Pemilu Myanmar ke Arah Solusi komprehensif Bagi Rohingya', di Gedung Parlemen Jakarta, Kamis (26/11). Foto : Naefuroji/Parle/OD



KSDD-PI bekerjasama dengan KORPRI Setjen DPR RI menyelenggarakan Donor Darah dalam rangka Hari Ulang Tahun KORPRI yang ke-44 di Lobby Gedung Nusantara, Rabu (25/11). Foto : Jaka/Parle/OD

